



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BANYUWANGI



<https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-banyuwangi/>



@bppsdm_bp3bwi



@bppsdm_bp3bwi



bppp_banyuwangi



BPPP Banyuwangi



@bppsdm_bp3bwi



@bppsdm_bp3bwi

KATA PENGANTAR



“Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi BPPP Banyuwangi Tahun 2026. Penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).”

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Banyuwangi menuju terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi dan di sisi lain. Laporan Kinerja merupakan alat kendali, pemacu, dan umpan balik peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPPP Banyuwangi.

Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum dan khususnya BPPP Banyuwangi bantuan perangkat lunak berbasis Logical Framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. *Performance* BPPP Banyuwangi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan

indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis BPPP Banyuwangi Tahun 2026 sebagai kontrak kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2026 yang mana IKU BPPP Banyuwangi merupakan hasil cascading dari IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan, IKU Level I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BPPSDMKP) dan IKU Level II Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai pada bidang pelatihan dan penyuluhan masyarakat KP serta dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya. BPPP Banyuwangi melalui hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPP Banyuwangi serta hambatan atau kendala yang dihadapi selama tahun 2026. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, Namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh BPPP Banyuwangi.

Dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi kepada yang berkepentingan.

Banyuwangi, 20 April 2026

Kepala BPPP Banyuwangi,



Moch. Muchlisin

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	2
1.4 Keragaan SDM.....	4
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	5
1.6 Potensi dan Permasalahan	7
2. PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.1.4 Sasaran Kegiatan	15
2.2 Rencana Kerja Tahun 2026	18
2.3 Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi.....	19
2.4 Pengukuran Kinerja.....	20
2.4.1 Rumus Pengukuran.....	20
2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja.....	21
BAB III. AKUNTABILITAS	22
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama	22
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2026.....	73
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPP Banyuwangi.....	76
BAB IV. PENUTUP.....	85
4.1 Capaian Kinerja Utama.....	85
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Triwulan I BPPP Banyuwangi Tahun 2026	xi
Tabel 2. Keragaan SDM BPPP Banyuwangi Per 31 Maret Tahun 2026	4
Tabel 3. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026	18
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2026	19
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026	23
Tabel 6. Capaian Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang).....	26
Tabel 7. Perbandingan realisasi Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang) dengan UPT Lingkup BPPSDMKP.....	27
Tabel 8. Capaian indikator Kinerja 3 Triwulan I Tahun 2026	31
Tabel 9. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan UPT Lingkup BPPSDMKP.....	32
Tabel 10. Capaian indikator Kinerja 6 Triwulan I Tahun 2026	35
Tabel 11. Perbandingan realisasi Nilai PNBK Triwulan I Tahun 2026 dengan UPT Lingkup BPPSDMKP	37
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja 8 Triwulan I Tahun 2026	39
Tabel 13. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	41
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja 11 Triwulan I Tahun 2026.....	44
Tabel 15. Perbandingan realisasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	45
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja 10 Tahun 2025	48
Tabel 17. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.....	49
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja 12 Triwulan I Tahun 2026.....	51
Tabel 19. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.....	52
Tabel 20. Capaian indikator Kinerja 16 Triwulan I Tahun 2026.....	56
Tabel 21. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDMKP	57
Tabel 22. Indikator kinerja Utama 17 Triwulan I Tahun 2026.....	60
Tabel 23. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDMKP.....	61
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja 18 Triwulan I Tahun 2026.....	63
Tabel 25. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	64
Tabel 26. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit)	67
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	68
Tabel 28. Realisasi Anggaran BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026	73
Tabel 29. Efisiensi Anggaran BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026	77
Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Kinerja Organisasi Pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Kinerjaku.....	x
Gambar 2. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi Tahun 2026.....	3
Gambar 3. Capaian Kinerja IKU + IKM	21
Gambar 4. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 BPPP Banyuwangi	22
Gambar 5. Nilai Kinerja Organisasi Pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Kinerjaku.....	85

RINGKASAN

LKJ Tahun 2026 menggambarkan tanggung jawab Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi untuk mewujudkan 3 Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Pada triwulan I, capaian kinerja BPPP Banyuwangi yaitu 9 IK berstatus biru dan 1 IK berstatus hijau sehingga nilai kinerja organisasi BPPP Banyuwangi berstatus “Istimewa”. Uraian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPPP Banyuwangi yaitu:

1. Sasaran Kegiatan **Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan** dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a) Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang) (IKU) dengan target tahun 2026 1.064 orang, dan target triwulan I sebanyak 70 orang.
 - b) Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Banyuwangi yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%) dengan target tahun 75% dan pada triwulan I tidak ada target.
 - c) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang) dengan target tahun 2026 sebanyak 1.400 orang dan pada triwulan I dengan target sebanyak 100 orang.
 - d) Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Banyuwangi (dokumen) dengan target tahun 2026 sebanyak 1 dokumen, dan pada triwulan I tidak ada target.
 - e) Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi (proposal) dengan target tahun 2026 sebanyak 1 proposal, dan pada triwulan I tidak ada target.
 - f) Nilai PNPB Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar) (IKU) dengan target tahun 2026 sebanyak 0,09 Miliar rupiah, dan pada triwulan I dengan target 0,03 miliar rupiah.
 - g) Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di

BPPP Banyuwangi (Dokumen) dengan target tahun 2026 sebanyak 1 dokumen dan pada triwulan I tidak ada target.

2. Sasaran Kegiatan **Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan** terdiri dari delapan indikator kinerja yaitu:

- a) Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%) dengan target tahun 2026 sebesar 100% dan pada triwulan I dengan target sebesar 25%.
- b) Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks), target tahun 2026 dengan nilai indeks sebesar 83 dan pada triwulan I tidak ada target.
- c) Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan target tahun 2026 senilai 81 dan pada triwulan I tidak ada target.
- d) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Banyuwangi (%) dengan target tahun 2026 sebesar 86%, dan pada triwulan I dengan target 86%.
- e) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan target sebesar 77% dan pada triwulan I targetnya 77%.
- f) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan target tahun 2026 senilai 71 dan pada triwulan I tidak ada target.
- g) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan target tahun 2026 senilai 92 dan pada triwulan I tidak ada target.
- h) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan target tahun 2026 senilai 71,5 dan pada triwulan I tidak ada target.

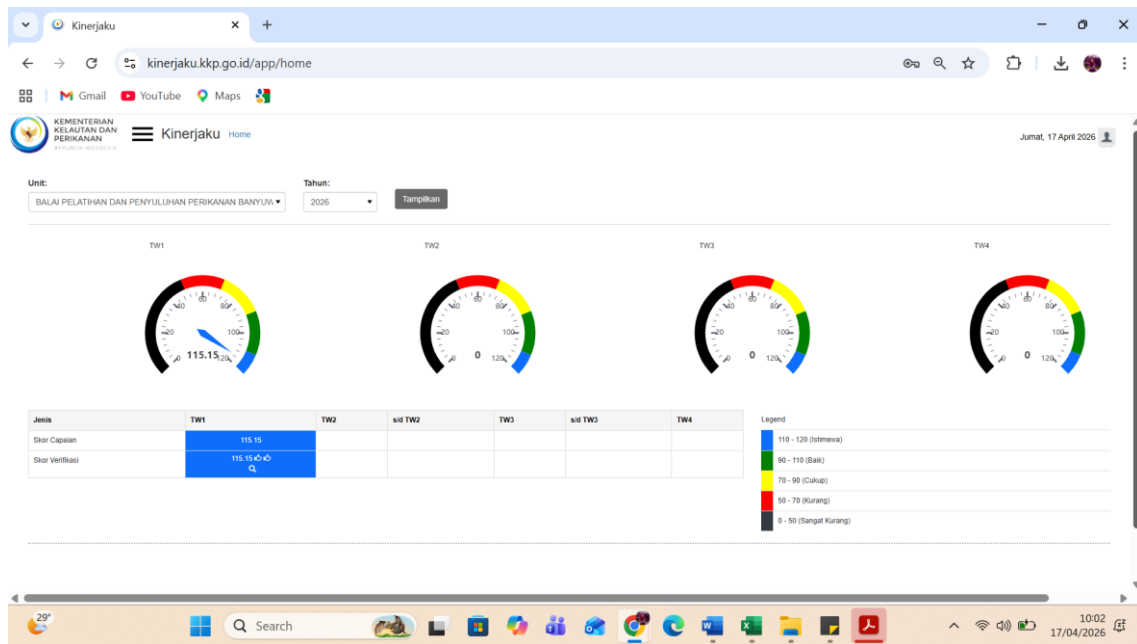
3. Sasaran Kegiatan **Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan** terdiri dari 6 indikator kinerja yaitu:

- a) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok) dengan target tahun 2026 sebanyak 231 kelompok, dan pada triwulan I dengan target sebanyak 5 kelompok
- b) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP

Banyuwangi (Kelompok) dengan target pada tahun 2026 sebanyak 6.911 kelompok dan pada triwulan I dengan target sebanyak 1.000 kelompok

- c) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok) dengan target tahun 2026 sebanyak 700 kelompok dan pada triwulan I dengan target sebanyak 25 kelompok.
- d) Gabungan Kelompok dan/atau KoperasiDesa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit) dengan target tahun 2026 sebanyak 69 unit dan pada triwulan I dengan target sebanyak 15 unit.
- e) Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Banyuwangi (Paket) dengan target tahun 2026 sebanyak 1 paket dan pada triwulan I tidak ada target.
- f) Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang) dengan target tahun 2026 sebanyak 9 orang dan pada triwulan I tidak ada target.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi pada triwulan ini **sebesar 115,15%**.



Gambar 1. Nilai Kinerja Organisasi Pada *Dashboard* Aplikasi Kinerjaku

Capaian Kinerja Triwulan I BPPP Banyuwangi Tahun 2026 secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Triwulan I BPPP Banyuwangi Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I (%)
I. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan					
1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	1.064	70	78	111,43
2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Banyuwangi yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75	-	-	-
3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	1.400	100	324	120
4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Banyuwangi (dokumen)	1	-	-	-
5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi (proposal)	1	-	-	-
6	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,09	0,03	0,22	120
7	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Banyuwangi (Dokumen)	1	-	-	-
II. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	25	29,63	118,52
9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	-	-	-
10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	81	-	-	-
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Banyuwangi (%)	86	86	86	100
12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	77	77	100	120

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I (%)
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Banyuwangi (Nilai)	71	-	-	-
14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	-	-	-
15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,5	-	-	-
III. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
16	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	231	5	6	120
17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	6.911	1.000	1.100	110
18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	700	25	35	120
19	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit)	69	15	17	113,33
20	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Banyuwangi (Paket)	1	-	-	-
21	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	9	-	-	-



IKU dibawah Pusat Pelatihan KP



IKU dibawah Pusat Penyuluhan KP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN, Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi pada Tahun 2026 ini melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah sesuai yang tertuang pada RENSTRA BPPP Banyuwangi.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai BPPP Banyuwangi serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPPP Banyuwangi guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi.

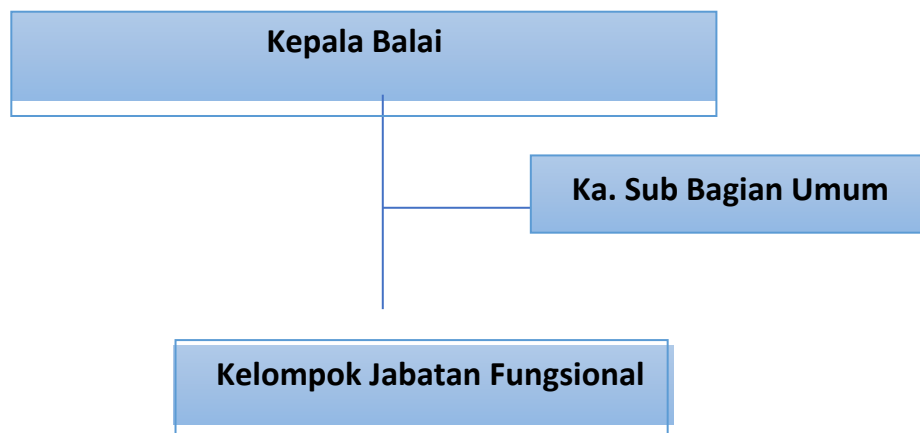
1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026 ini bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Tahun 2026.
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPP Banyuwangi untuk meningkatkan kinerjanya sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dipimpin oleh kepala balai yang merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator dengan struktur organisasi terdiri atas Sub bagian umum dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 2. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi Tahun 2026

Dalam pelaksanaan tugas BPPP Banyuwangi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan
- c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan
- d. Penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utamadan pelaku usaha
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sedangkan tugas dari setiap organisasi di BPPP Banyuwangi yaitu :

1. Subbagian Umum melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4 Keragaan SDM

Dalam mendukung kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025, jumlah SDM yang memadai sangat diperlukan khususnya untuk pengelolaan dalam fungsi pelatihan dan penyuluhan. Perkembangan jumlah SDM Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, berikut data jumlah pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

Tabel 2. Keragaan SDM BPPP Banyuwangi Per 31 Maret Tahun 2026

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Balai	1
2.	Kepala Sub Bagian Umum	1
3.	Instruktur	19
4.	Fungsional Tertentu	11
5.	Fungsional Umum	33
6.	Penyuluh Perikanan PNS	378
7.	Penyuluh Perikanan PPPK	295
8.	Penyuluh Perikanan PPPK Paruh Waktu	4
9.	PPPK Administrasi	17
10.	PPPK Paruh Waktu	15
Total		774

Sumber: Kepegawaian BPPP Banyuwangi, 2026

Jumlah pegawai BPPP Banyuwangi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 310 orang perempuan (40%) dan 464 pegawai berjenis kelamin laki-laki (60%). Komposisi pegawai BPPP Banyuwangi menunjukkan bahwa proporsi pegawai laki-laki (60%) lebih tinggi dibandingkan perempuan (40%). Kesenjangan ini mencerminkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang kelautan dan perikanan, khususnya di lembaga pelatihan teknis, masih relatif rendah dibandingkan laki-laki.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Dasar haluan yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi pada Tahun 2026 adalah :

- a. Ketetapan MPR Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaam Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPP Banyuwangi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Tahun 2026 serta pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 di Tahun 2026. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

**LKJ BPPP
Banyuwangi
mengacu pada
Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014**

Ringkasan Eksekutif, menyajikan uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2026

Bab I Pendahuluan, menyajikan hal-hal umum tentang BPPP Banyuwangi seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPP Banyuwangi pada Tahun 2025

Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan uraian singkat tentang Rencana Strategis BPPP Banyuwangi 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya

Bab IV Penutup, menyajikan uraian singkat terkait kesimpulan, pemmasalahan dan rekomendasi.

Lampiran, menyajikan pendukung laporan seperti Perjanjian Kinerja, Surat tugas penyusunan laporan kinerja dan realisasi anggaran per IKU

1.6 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi bertugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan pada wilayah kerja di untuk pelatihan berada pada 6 provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sedangkan untuk wilayah kerja penyuluhan ada pada 4 propinsi yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Kegiatan pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di bidang budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kegiatan penyuluhan bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan serta penyusunan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, maupun PPPK.

Keberhasilan pencapaian karena adanya potensi sumberdaya BPPP Banyuwangi yaitu :

1. Memiliki SDM yang berpengalaman di bidangnya dengan jumlah instruktur sebanyak 16 orang, widyaiswara sebanyak 1 orang, dan jumlah penyuluh sebanyak 671 orang
2. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang memadai dan representatif berupa sarana ruang kelas, workshop pelatihan bidang penangkapan ikan, budidaya, pengolahan, mesin perikanan, kelautan, navigasi.
3. Penyelenggarakan Diklat bidang kepelautan yaitu *Basic Safety Training*.
4. Memiliki lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP) I KP

yang telah dilisensi oleh BNSP dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP Kelautan dan Perikanan dengan jumlah TUK sebanyak 5 TUK yaitu TUK penangkapan ikan, TUK Budidaya Perikanan, TUK Pengolahan Hasil Perikanan, TUK Permesinan, dan TUK Produksi Garam

5. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu (ISO 9001 : 2015)
6. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk mencapai tujuan organisasi yaitu dengan adanya dukungan kebijakan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia KP untuk mengembangkan mutu diklat

b. Permasalahan

Pada tahun ini, pemerintah mengambil kebijakan efisiensi anggaran sehingga terjadi pengurangan/penghematan anggaran yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini target yang hendak dicapai satker BPPP Banyuwangi beberapa kali dilakukan penyesuaian target dengan jumlah anggaran yang tersedia. Selain masalah anggaran, sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama *stakeholder* dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain:

❖ Aspek penyelenggaraan pelatihan KP antara lain:

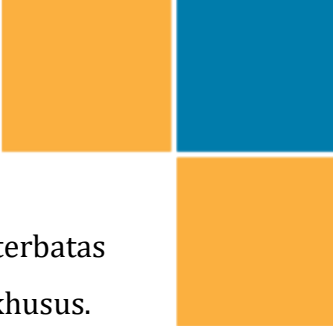
1. Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas;
2. Sarana dan prasarana pelatihan belum memenuhi standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan perkembangan teknologi saat ini;
3. Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandar;
4. Kompetensi SDM pelatihan BPPP Banyuwangi perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan;
5. Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP

6. Ketertelusuran (*tracer study*) lulusan pendidikan dan pelatihan belum efektif.
7. Modul pembelajaran belum adaptif terhadap teknologi dan kebutuhan industri.
8. Standar pelatihan dan sertifikasi belum sepenuhnya sinkron dengan K/L lain dan standar internasional.

❖ Aspek ketenagaan penyuluh perikanan

Ketenagaan penyuluh perikanan dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya:

- a) Tata kelola penyuluhan daerah belum optimal sehingga pendampingan pelaku usaha tidak merata
- b) Jumlah penyuluh perikanan masih belum sebanding dengan jumlah pelaku utama yang harus disuluh.
- c) Kompetensi sebagian penyuluh perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- d) Penyebaran penyuluh perikanan belum merata di seluruh kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan.
- e) Penyuluh perikanan masih mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi, informasi pasar, permodalan, dan sumber daya pendukung lainnya.
- f) Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional maupun teknis masih terbatas.
- g) Legislasi dan regulasi terkait penyuluhan perikanan belum seluruhnya tersedia dan mendukung pelaksanaan tugas.
- h) Kualitas dan kuantitas penyuluh perikanan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan penempatan, masih belum memadai.
- i) Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas penyuluh secara optimal.
- j) Materi penyuluhan belum spesifik lokasi

- 
- k) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan masih terbatas seperti anggaran penumbuhan kelompok pelaku usaha belum tersedia khusus.

2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berkontribusi terhadap pengawalan 5 kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona; (3) pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil; dan (5) pengurangan sampah plastik laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan SDM yang inovatif, kompeten dan berdaya saing untuk mensukseskan kebijakan Blue Economy KKP. Strategi pengembangan SDM dijalankan melalui program penyuluhan, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan standardisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPPSDM KP 2025–2029. Beberapa program utama yang dikedepankan meliputi:

1. Penyuluhan KP dengan pendekatan Super Extension (Suggestive, Useful, Performative, Effective, Reliable);
2. Pendidikan KP melalui pengembangan Ocean Institute of Indonesia (OII);
3. Pelatihan KP berbasis Corporate University dan Community Learning Center;
4. Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP melalui Certification Agency (Certifa).

A. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Rumusan ini mencerminkan aspirasi nasional untuk menempatkan Indonesia sebagai negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang satu abad kemerdekaan. Pembangunan sumber daya manusia ditempatkan sebagai prioritas utama yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan bangsa di tengah perubahan global.

Sebagai kementerian yang memiliki mandat strategis, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian visi

nasional tersebut. Untuk periode 2025–2029, KKP merumuskan visi “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menekankan bahwa keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bukan hanya menjadi pilar ekonomi nasional, melainkan juga instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat basis ekonomi biru Indonesia. Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) merumuskan visi spesifik, yaitu “Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan .” Visi tersebut menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia yang mampu menjawab tantangan kontemporer sektor kelautan dan perikanan. SDM yang inovatif akan mendorong lahirnya kreativitas serta adaptasi terhadap dinamika perubahan. SDM yang dimaksud adalah SDM pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing serta SDM calon tenaga kerja yang kompeten yang akan memastikan relevansi keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). SDM yang berdaya saing memperkuat posisi Indonesia dalam arena global yang sarat kompetisi. Landasan hukum visi BPPSDMKP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024, Pasal 33, yang mengamanatkan fungsi strategis badan meliputi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan; (2) pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM KP; (3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM KP; (4) pelaksanaan administrasi badan; dan (5) fungsi lain sesuai penugasan Menteri. Fungsi ini menjadi instrumen pengintegrasian penyuluhan, pendidikan, pelatihan, serta standardisasi dan sertifikasi ke dalam sistem pembangunan nasional yang berorientasi pada kualitas SDM.

B. Misi

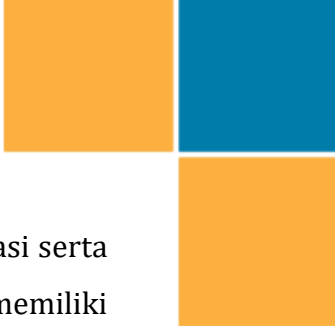
KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7

Dalam melaksanakan misi KKP ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan perikanan”. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”

Untuk mewujudkan Misi BPPSDM Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing” dengan indikator meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

Perekonomian nasional diarahkan untuk tumbuh melalui sektor kelautan dan perikanan sebagai *engine of growth*. Produktivitas hasil perikanan ditingkatkan, sumber pertumbuhan baru dioptimalkan, dan nilai tambah diciptakan sehingga memberikan multiplier effect yang luas. Agenda penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui pendekatan inklusif yang menjangkau nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah, pemasar, serta masyarakat pesisir yang rentan terhadap bencana iklim. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan peran SDM yang inovatif, kompeten dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui pendidikan, pelatihan, vokasi, dan



penyuluhan yang sesuai kebutuhan industri, diperkuat dengan standardisasi serta sertifikasi kompetensi agar SDM kelautan dan perikanan dan pelaku usaha memiliki daya saing tinggi, adaptif terhadap teknologi, serta relevan dengan tuntutan pasar kerja.

Peran BPPSDM dalam mendukung keberhasilan kebijakan Blue Economy dilakukan dalam upaya menyiapkan SDM kelautan dan perikanan yang kompeten dan berdayasaing sebagai calon tenaga kerja serta pelaku usaha kelautan dan perikanan yang inovatif dan berdayasaing. Peran BPPSDMKP dilakukan melalui kegiatan penyuluhan diarahkan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, menumbuhkembangkan kelompok pelaku usaha, pendampingan kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya seperti koperasi, gabungan kelompok (Gapokkan) dengan terus meningkatkan kesadaran untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya KP. Pendidikan vokasi menjadi jalur strategis untuk regenerasi penerus sebagai pelaku usaha KP yang inovatif, kompeten dan tumbuh menjadi pelaku wirausaha muda yang memiliki pengetahuan komprehensif (pelaku usaha KP milenial). Disamping itu, pendidikan vokasi juga didorong untuk menyiapkan lulusan siap kerja yang selaras dengan kebutuhan industri; pelatihan dirancang untuk memperkuat keterampilan teknis, manajerial, dan sosial-kultural bagi pelaku utama/usaha, calon tenaga kerja serta aparatur yang berintegritas; standardisasi dan sertifikasi memastikan pengakuan kompetensi yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional.

C. Tujuan

Fokus utama tujuan strategis terletak pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang inovatif, kompeten, dan berdaya saing. Pencapaian tujuan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru yang inovatif dan berdaya saing, kelembagaan kelompok pelaku usaha yang kuat dan mandiri serta menghasilkan calon wirausaha muda baru yang berlatar belakang pendidikan serta menjawab kebutuhan calon tenaga kerja melalui adanya keterhubungan lebih kuat antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Selain itu, tujuan juga diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan strategis BPPSDMKP 2025–2029 dapat dirinci ke dalam empat pilar utama sebagaimana berikut :

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsilingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing, dan;
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Penyusunan sasaran kegiatan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi merupakan wujud kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Renstra KKP 2025-2029, khususnya pada SS-4 mengenai Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan serta SS-5 terkait Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas. Sasaran strategis tersebut kemudian diturunkan menjadi Sasaran Program (SP) melalui Peraturan Kepala BPPSDM KP Nomor 25 Tahun 2025 tentang Renstra BPPSDM KP 2025-2029, yang berfokus pada SP-1 yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM KP, serta SP-2 mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP.

Sasaran Kegiatan BPPP Banyuwangi ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yakni:

1. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
3. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Ketiga Sasaran Strategis BPPP Banyuwangi dijabarkan dalam 21 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan beserta target yang akan dicapai di tahun 2026.

Sasaran Kegiatan pertama (SK.01) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan. Sasaran kegiatan ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada SS-4 yaitu Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan serta mendukung Sasaran Program (SP) BPPSDMKP pada SP-1 yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM KP. Sasaran Strategis ini terdiri dari tujuh Indikator Kinerja yaitu:

1. Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) dengan target 1.064 orang pada tahun 2026 dan pada tahun 2029 satuan indikator ini berupa orang yaitu sebanyak 5.713 orang
2. Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Banyuwangi yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%) dengan target PK sebanyak 75 orang pada tahun 2026 dan pada tahun 2029 tidak ada target.
3. Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang) dengan target sebanyak 1.400 peserta pada tahun 2026 dan pada tahun 2029 sebanyak 8.887 orang
4. Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Banyuwangi (dokumen), dengan target sebanyak 1 dokumen pada tahun 2025 dan tidak ada target pada tahun 2029.
5. Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi (proposal) dengan target pada tahun 2025 sebanyak 1 proposal dan pada tahun 2029 tidak ada target.
6. Nilai PNBK Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar) target 0,319 miliar dengan pembulatan keatas menjadi 0,09 miliar pada tahun 2026 dan pada tahun 2029

sebesar 0,78 milyar

7. Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Banyuwangi (Dokumen) dengan target pada tahun 2026 sebanyak 1 dokumen dan pada tahun 2029 tidak ada target.

Sasaran Strategi ketiga (SK.02) yang akan dicapai adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Sasaran ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada SS-5 terkait Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas. Sasaran strategis tersebut juga mendukung Sasaran Program (SP) BPPSDMKP pada SP-2 mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP. Sasaran Kegiatan ini terdiri dari enam indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%) dengan target 100% pada tahun 2026-2029
2. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks) dengan target indeks sebesar 83 pada tahun 2026-2029
3. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan target nilai sebesar 81 pada tahun 2026 dan 83 pada tahun 2029
4. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%) dengan target sebesar 86% pada tahun 2025 dan 89% pada tahun 2029
5. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan target sebesar 77% pada tahun 2026 dan 84% pada tahun 2029.
6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan target pada tahun 2026 senilai 71 dan pada tahun 2029 tidak ada target.
7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan target nilai sebesar 92 pada tahun 2026-2029
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan target nilai sebesar 72 pada tahun 2026, dan pada tahun 2029 senilai 71,5

Sasaran strategis ketiga (SK.03) yang akan dicapai adalah

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Sasaran kegiatan ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada SS-4 yaitu Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan serta mendukung Sasaran Program (SP) BPPSDMKP pada SP-1 yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM KP dengan indikator kinerja yaitu:

1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan target sebanyak 231 kelompok pada tahun 2026 dan 326 pada tahun 2029
2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan target sebesar 6.911 kelompok pada tahun 2026 dan 9.169 pada tahun 2029
3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan target sebanyak 700 kelompok pada tahun 2026 dan 778 pada tahun 2029
4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit) dengan target sebanyak 69 unit pada tahun 2026 dan 324 pada tahun 2029
5. Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Banyuwangi (Paket) dengan target 1 paket pada tahun 2026 dan pada 2029 tidak ada target
6. Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi dengan target sebanyak 9 orang pada tahun 2026 dan pada tahun 2029 sebanyak 85 orang

2.2 Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BPPP Banyuwangi Tahun 2026 menetapkan program yaitu kegiatan pelatihan dan Penyuluhan dengan pagu anggaran yang tersedia. Pada tahun 2026, terjadi kebijakan efisiensi anggaran dan penambahan pagu PNBP sehingga dilakukan perubahan/revisi anggaran sebanyak tiga kali dari pagu awal Rp. 118.026.235.000,00 berubah menjadi Rp. 118.965.319.000,00 pada Maret 2026 dengan rincian kegiatan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	Pelatihan kelautan dan perikanan	2.942.800.000	5.371.694.000
2	Penyuluhan kelautan dan perikanan	99.873.033.000	98.683.585.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDMKP	15.210.402.000	14.910.040.000
Total Anggaran BPPP Banyuwangi		118.026.235.000	118.965.319.000

2.3 Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDM KP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan Sasaran Strategis BPPP Banyuwangi dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPPP Banyuwangi dengan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (PuslatKP) dan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (PusluhKP). Adapun rincian Perjanjian Kinerja BPPP Banyuwangi secara berurutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET AWAL
Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	orang	1.064
	2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Banyuwangi yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	%	75
	3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	orang	1.400
	4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Banyuwangi (dokumen)	Dokumen	1
	5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi (proposal)	Proposal	1
	6	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi	Rupiah Miliar	0,09
	7	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Banyuwangi (Dokumen)	Dokumen	1
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang	8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	%	100
	9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	Indeks	83

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET AWAL
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	Nilai	81
	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Banyuwangi (%)	%	86
	12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	%	77
	13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Banyuwangi (Nilai)	Nilai	71
	14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	Nilai	92
	15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	Nilai	71,5
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	16	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	Kelompok	231
	17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	Kelompok	6911
	18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	Kelompok	700
	19	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit)	Unit	69
	20	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Banyuwangi (Paket)	Paket	1
	21	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	Orang	9

Keterangan:

	: Perjanjian Kinerja Kepala BPPP Banyuwangi dengan Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
	: Perjanjian Kinerja Kepala BPPP Banyuwangi dengan Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

2.4 Pengukuran Kinerja

2.4.1 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen. Perhitungan Indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu

maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- Angka maksimum atau istimewa adalah 120;
- Angka minimum atau belum ada penilaian adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- Status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 – 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 3. Capaian Kinerja IKU + IKM

2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja

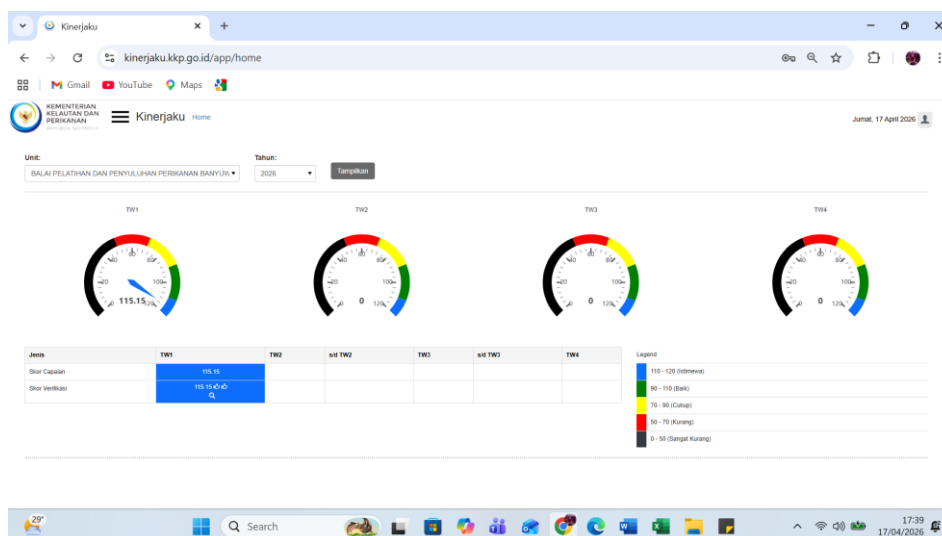
Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Banyuwangi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim Pengelola Kinerja dan SAKIP lingkup BPPP Banyuwangi yang ditetapkan melalui SK Kepala BPPP Banyuwangi Tahun 2026 Nomor: B.230/BPPP.BYW/TU.140/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kinerja dan SAKIP TA. 2026. Pada pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan ditugaskan kepada seluruh anggota tim dan melaporkannya kepada kepala Balai.

BAB III. AKUNTABILITAS

3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026 sebesar 115,15% sebagaimana *dashboard* kinerjaku sebagai berikut. Dengan hasil tersebut, maka BPPP Banyuwangi mendapatkan predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) “**Istimewa**”. Capaian ini tidak hanya merupakan hasil kinerja para ketua tim kerja, namun juga didukung oleh kontribusi aktif seluruh anggota tim dan pegawai di setiap lini organisasi. Tingginya capaian NKO mencerminkan bahwa secara umum kinerja pegawai telah berjalan dengan baik dan optimal, meskipun dalam penilaian individu, predikat “**sangat baik**” masih diberikan secara selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan ini pada hakikatnya merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam mendukung pencapaian target organisasi.



Gambar 4. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 BPPP Banyuwangi

Sumber: web kinerjaku.kkp.go.id

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPP Banyuwangi Tahun 2026. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran kegiatan dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis BPPP Banyuwangi yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2026 dapat tercapai.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I (%)
II. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan					
1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	1.064	70	78	111,43
2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Banyuwangi yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75	-	-	-
3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	1.400	100	324	120
4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Banyuwangi (dokumen)	1	-	-	-
5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi (proposal)	1	-	-	-
6	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,09	0,03	0,22	120

No.	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I (%)
7	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Banyuwangi (Dokumen)	1	-	-	-
III. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	25	29,63	118,52
9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	-	-	-
10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	81	-	-	-
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Banyuwangi (%)	86	86	86	100
12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	77	77	100	120
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Banyuwangi (Nilai)	71	-	-	-
14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	-	-	-
15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,5	-	-	-
III. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
16	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	231	5	6	120
17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	6.911	1.000	1.100	110
18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	700	25	35	120
19	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit)	69	15	17	113,33

No.	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I (%)
20	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Banyuwangi (Paket)	1	-	-	-
20	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	9	-	-	-

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan terdapat 7 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 1) Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang), 2) Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Banyuwangi yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%) 3) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi 4) Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Banyuwangi (dokumen) 5) Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi (proposal) 6) Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar), 7) Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Banyuwangi (Dokumen). Sasaran kegiatan ini didukung anggaran dari BPPP Banyuwangi dengan pagu awal Januari sebesar Rp 118.965.319,00 dan mengalami revisi pada bulan Maret menjadi Rp. 118.026.235.000 dan realisasi sebesar Rp. 27.375.687.684,00 dengan persentase 23,01 %. Adapun capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 1

Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)

Jumlah lulusan pelatihan terserap DUDIKA merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha pada semester 2 tahun sebelumnya dan semester 1 tahun berjalan yang telah bekerja di DUDIKA

dan atau menerapkan hasil pelatihan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada tahun 2026 target pada indikator ini sebesar 1.064 orang dan telah tercapai sebesar 78 orang (7,33%). Berikut capaian indikator yang dimaksud.

Tabel 6. Capaian Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)

IKU 1. Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Orang)									
Realisasi				Triwulan I 2026				Rencana Target Kinerja 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	70	78	111,43	-	5.713	1,37

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian IKU 1 yaitu Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 70 orang, realisasi yang dicapai adalah 78 orang atau sebesar 111,43%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pengukuran capaian penyerapan lulusan pelatihan KP yang terserap di DUDIKA dilakukan secara semesteran, sehingga capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan periode sebelumnya. Meskipun demikian, capaian yang telah melampaui target pada awal tahun ini menunjukkan indikasi kinerja yang positif dan menjadi modal awal yang baik untuk pencapaian target pada periode selanjutnya. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan pasar kerja, penguatan kurikulum dan metode pembelajaran, peningkatan kualitas instruktur, serta perluasan jejaring kemitraan dengan DUDIKA.

Jika dibandingkan dengan rencana target kinerja 2025-2029, yang pada tahun 2029 targetnya sebesar 5.713 orang, maka capaian pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 78 orang baru mencapai 1,37%. Meskipun secara persentase terhadap target jangka panjang masih relatif kecil, capaian ini

merupakan kontribusi awal yang positif dalam mendukung pencapaian target 2029. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi kinerja serta penguatan strategi, khususnya dalam memperluas kemitraan dengan DUDIKA dan meningkatkan kapasitas pelatihan, agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil capaian pada tahun tahun sebelumnya yaitu 2025 mengindikasikan bahwa strategi BPPP Banyuwangi dalam peningkatan kualitas pelatihan, penguatan *link and match* dengan DUDIKA, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi alumni telah berjalan efektif dan berada di atas proyeksi perencanaan jangka menengah sehingga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026 masih berada pada jalur yang positif untuk mendukung pencapaian target Rencana Kegiatan BPPP Banyuwangi Tahun 2025–2029 secara berkelanjutan.

Tabel 7. Perbandingan realisasi Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang) dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	70	78	111,43
2	BPPP Medan	55	58	105,45
3	BPPP Tegal	2.130	2269	106,53

Berdasarkan perbandingan realisasi IKU 1 pada Triwulan I Tahun 2026 dengan UPT lingkup BPPSDMKP, BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 111,43% (realisasi 78 orang dari target 70 orang). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan BPPP Medan yang mencapai 105,45% (58 orang dari target 55 orang) dan BPPP Tegal sebesar 106,53% (2.269 orang dari target 2.130 orang). Meskipun secara absolut jumlah realisasi BPPP Banyuwangi lebih kecil dibandingkan BPPP Tegal, namun dari sisi persentase capaian terhadap target, BPPP Banyuwangi merupakan yang tertinggi di antara UPT yang dibandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pelatihan dan penyerapan lulusan di BPPP Banyuwangi berjalan dengan sangat optimal dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Perbedaan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh variasi karakteristik wilayah, intensitas kerja sama dengan DUDIKA, serta kebutuhan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan di



masing-masing daerah. Secara keseluruhan, capaian BPPP Banyuwangi menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kinerja nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam penyediaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang kompeten dan siap kerja.

Keberhasilan pencapaian IKU Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) pada Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai 111,43% dari target didukung oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor kunci adalah penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sektor kelautan dan perikanan sehingga kompetensi lulusan memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan pasar kerja, terdapat lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha/ membangun *start up* dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, kualitas pelaksanaan pelatihan turut berkontribusi terhadap keberhasilan capaian kinerja, antara lain melalui ketersediaan instruktur yang kompeten dan berpengalaman, metode pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik yang meningkatkan daya saing lulusan. Pelaksanaan praktik kerja dan pemagangan juga memperkuat kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja.

Faktor pendukung lainnya adalah penguatan kemitraan dan jejaring kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDIKA) yang membuka peluang penyerapan lulusan secara lebih luas. Selain itu, dukungan manajemen dan koordinasi internal yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pelatihan turut memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, sinergi antara perencanaan yang tepat, kualitas pelaksanaan pelatihan, serta dukungan kemitraan dengan DUDIKA menjadi faktor utama keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam mencapai dan melampaui target kinerja triwulan I Tahun 2026.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari optimalisasi peran penyuluh perikanan di lapangan dalam pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan, sehingga dapat mengurangi kebutuhan biaya perjalanan bagi petugas

evaluasi. Selain itu, proses rekapitulasi hasil evaluasi pasca pelatihan menjadi lebih efisien karena data hasil evaluasi telah disampaikan dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan. Efisiensi juga didukung melalui optimalisasi anggaran pelatihan yang dilakukan melalui perencanaan kegiatan yang terarah, penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan industri, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan secara maksimal. Penugasan instruktur dan tenaga pendukung dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan kegiatan, sehingga proses pelatihan dapat berjalan optimal tanpa pemborosan sumber daya. Secara keseluruhan, capaian kinerja yang melampaui target dengan sumber daya yang tersedia menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya di BPPP Banyuwangi pada triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Upaya strategis BPPP Banyuwangi dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase lulusan pelatihan yang terserap di DUDIKA diantaranya:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
2. Mewajibkan pendaftar, dalam hal ini Perkumpulan Nelayan dan Pengusaha Perikanan “Samudra Bestari” untuk menyampaikan surat permohonan Diklat yang mencantumkan nama perusahaan tempat peserta bekerja sebagai persyaratan administrasi pendaftaran pelatihan guna memenuhi data dukung capaian.

Pada IK lulusan pelatihan KP yang terserap di DUDIKA, dari total 78 purnawidya yang terserap, sebanyak 100% adalah laki-laki yang mengikuti pelatihan Keselamatan Dasar Kapal Perikanan Tingkat II (BSTF II) , Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang kerja bagi lulusan pelatihan di sektor perikanan (kepelautan) bagi perempuan belum cukup terbuka dan masih terdapat kesenjangan dibandingkan laki-laki.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Banyuwangi yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)

Indikator Kinerja ini mengukur sejauh mana peserta pelatihan masyarakat KP yang diselenggarakan pada semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan dengan metode pembelajaran secara luring, mampu mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dalam aktivitas nyata, baik dalam bentuk peningkatan produktivitas usaha, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, maupun penguatan kapasitas kerja di sektor kelautan dan perikanan. Data dukung indikator ini berupa dokumen Evaluasi Pasca Pelatihan yang disusun oleh penyelenggara pelatihan masyarakat KP. IK ini baru. Pada Triwulan I, belum terdapat target pada indikator ini, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan akan dilakukan pengukuran capaian di triwulan 2 dan 4. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:

1. Melakukan pendataan purnawidya berdasarkan wilayah dan kompetensi bidang pelatihan yang diikuti.
2. Mengklasifikasikan peserta sebagai pelaku utama/pelaku usaha perikanan, baik yang telah memiliki kelompok usaha maupun yang bekerja di perusahaan perikanan.
3. Menyiapkan perangkat monitoring dan evaluasi terhadap keterlibatan purnawidya yang telah menerapkan kompetensi hasil pelatihan.

Indikator Kinerja 3

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria: Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular (*full* tatap muka) dan pelatihan *online* atau daring, dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama kecuali pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi dengan formula perhitungan akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria pelatihan. IKU ini didukung anggaran dengan pagu revisi Rp. 2.539.501.000,00 dan realisasi Rp 1.546.800,00 dengan persentase capaian 0,06%. Realisasi ini digunakan untuk

biaya perjalanan dinas pelatihan offline. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih diperoleh dari data Katimja Pelatihan dan capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Capaian indikator Kinerja 3 Triwulan I Tahun 2026

IKU 3-Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)									
Realisasi				2026				Rencana Target Kinerja 2025– 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
1.763	2.074	4.511	224	100	324	120	44,64	8.887	3,65

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian IKU 3 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 100 orang, realisasi yang dicapai adalah 324 orang atau sebesar 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan telah melampaui target yang direncanakan pada periode Triwulan I dan mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Capaian IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan dinamika jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih mencapai 4.511 orang, sedangkan pada Tahun 2025 realisasi hingga triwulan I Tahun 2025 tercatat sebanyak 224 orang. Dibandingkan dengan Tahun 2025, capaian tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 44,64%. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan fokus dan skala pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyesuaian kebijakan program, serta penetapan target kinerja Tahun 2025–2029 yang lebih terukur dan realistis akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran. Sumber pelatihan terbanyak dari pelatihan daring sehingga lebih banyak peserta yang mengikuti pelatihan.

Berdasarkan perbandingan antara capaian triwulan I Tahun 2026 dengan target yang ditetapkan dalam target kinerja Tahun 2025–2029, capaian IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 8.887 orang, capaian pada Triwulan I

Tahun 2026 telah mencapai 324 orang (3,65%). Meskipun secara persentase masih relatif kecil terhadap target jangka menengah, capaian ini merupakan awal yang positif dalam mendukung pencapaian target tersebut. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan program pelatihan serta penguatan strategi ke depan agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	100	324	120,00
2	BPPP Medan	200	200	100,00
3	BPPP Tegal	3098	3227	104,16

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa BPPP Banyuwangi mencatat realisasi sebanyak 324 orang dari target 100 orang, dengan tingkat capaian sebesar 120%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan sejajar dengan capaian beberapa UPT lainnya, seperti BPPP Tegal dan BPPP Medan. Dibandingkan dengan UPT lainnya, capaian BPPP Banyuwangi berada pada kelompok UPT dengan kinerja tertinggi, meskipun secara absolut jumlah peserta yang dilatih masih lebih rendah dibandingkan BPPP Tegal yang memiliki target dan realisasi lebih besar. Perbedaan jumlah target dan realisasi antar UPT dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kapasitas sarana prasarana, serta skala pelaksanaan pelatihan di masing-masing satuan kerja. Secara keseluruhan, capaian BPPP Banyuwangi menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kinerja BPPSDMKP, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan pelatihan yang efektif dan tepat sasaran.

Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan karena telah tersedianya pedoman penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dan modul yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi masyarakat KP, instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dilatihkan, dan sarana prasarana yang terstandar.



Faktor pendukung lainnya adalah sinergi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, penyuluh perikanan, dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Dukungan penyuluh perikanan di lapangan berperan penting dalam menjaring peserta serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pelatihan. Secara keseluruhan, kombinasi antara perencanaan yang matang, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi dan kemitraan yang efektif menjadi faktor utama keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam melampaui target kinerja pada triwulan I Tahun 2026.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari perencanaan kegiatan pelatihan yang terarah, pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan secara optimal, serta pengaturan jadwal dan metode pelatihan yang efektif. Dukungan penyuluh perikanan di lapangan turut berperan dalam menjaring peserta dan mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga pelatihan dapat menjangkau peserta lebih luas dengan biaya yang relatif terkendali. Selain itu, pemanfaatan koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait memungkinkan pelaksanaan pelatihan berjalan lebih efektif, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun sumber daya manusia. Penugasan instruktur dan tenaga pendukung dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan kegiatan, sehingga pelaksanaan pelatihan dapat berjalan optimal.

Kegiatan penunjang keberhasilan ini dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Pelatihan tersebut mencakup beberapa bidang utama, antara lain kepelautan, kelautan, budidaya perikanan, serta diversifikasi produk olahan hasil perikanan. Dukungan anggaran jumlah masyarakat dilatih yang memiliki dukungan anggaran APBN pada DIPA BPPP Banyuwangi triwulan Tahun 2026 pada RO 2375.SCC.831 dengan jumlah output sebanyak 2.765 orang yang sudah tercapai 0,08%. Kegiatan pelatihan melalui pendanaan ini digunakan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat berbasis *online training/blended* baik melalui bimtek maupun pelatihan teknis perikanan, pelatihan dasar kepelautan, dan pelatihan BSTF tingkat I. Selain itu, materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan perkembangan teknologi

serta kebijakan di sektor kelautan dan perikanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing pelaku usaha maupun aparatur. Selain pelatihan tatap muka, sebagian kegiatan juga dilaksanakan secara daring sebagai upaya memperluas jangkauan peserta, meningkatkan efisiensi pelaksanaan, serta memberikan akses pembelajaran yang lebih merata bagi peserta dari berbagai wilayah. Dengan kombinasi metode luring dan daring, kegiatan penunjang ini mampu menjangkau lebih banyak peserta dan mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

Pada IK masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih, komposisi peserta relatif lebih seimbang dibanding indikator lainnya. Dari total 324 peserta, sebanyak 251 orang (77,46%) berjenis kelamin laki-laki dan 74 orang (22,53%) perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa akses perempuan terhadap pelatihan teknis ada namun masih terbatas, terutama pada pelatihan pengolahan hasil perikanan, sementara untuk pelatihan kepelautan sepenuhnya dari peserta laki-laki.

Indikator Kinerja 4

Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Banyuwangi (dokumen)

Indikator kinerja ini mengukur jumlah naskah perangkat pelatihan yang disusun dan diusulkan oleh BPPP Banyuwangi kepada Puslat KP dan ditetapkan sebagai perangkat pelatihan resmi yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan. IK ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun ini dan baru akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun dengan target sebanyak 1 dokumen. Data dukung capaian IK ini yaitu Naskah perangkat pelatihan BPPP Banyuwangi dan Surat Penyampaian Naskah perangkat pelatihan BPPP Banyuwangi ke Pusat Pelatihan KP.

Indikator Kinerja 5

Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi (proposal)

Indikator kinerja ini mengukur jumlah usulan proposal inovasi pelatihan berbasis kaji terap bidang kelautan dan perikanan yang disusun dan diajukan oleh BPPP Banyuwangi kepada Pusat Pelatihan KP. Proposal ini memuat

rancangan pengembangan metode atau teknologi pelatihan yang akan diuji coba di lapangan (kaji terap) untuk memastikan efektivitasnya sebelum dijadikan standar materi pelatihan. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan dokumen proposal yang telah dikirimkan untuk kemudian mengikuti tahapan seleksi, pembahasan, dan validasi di tingkat pusat. Target indikator ini sebanyak 1 proposal dan baru akan dilakukan pengukuran capaian pada akhir tahun 2026. Data dukung capaian IK ini yaitu Proposal Inovasi pelatihan berbasis Kaji Terap dan Surat usulan proposal kaji terap.

Indikator Kinerja 6

Nilai PNBPN Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)

IKU ini merupakan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. IKU ini dukungan anggaran dengan pagu Rp. 657.884.000,00 dan realisasi 0 karena belum serah terima pengerjaan sarana prasarana dan pelatihan BSTF belum mengeluarkan anggaran, sedangkan target PK pencapaian kinerja PNBP sebesar Rp 90.635.000 pada tahun 2026, sedangkan target triwulan I sebesar 0,03 miliar rupiah. Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretariat BPPSDMKP Nomor1448/BPPSDM.1/KU.340/IV/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Capaian Kinerja PNBP Triwulan I Tahun Anggaran 2026, capaian PNBP BPPP Banyuwangi sebesar Rp 216.090.053,00 Capaian IKU nilai PNBP BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Capaian indikator Kinerja 6 Triwulan I Tahun 2026

IKU 6. Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Miliar Rupiah)									
Realisasi				2026				Rencana Target Kinerja 2025– 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029

IKU 6. Nilai PNBPN Satker BPPP Banyuwangi (Miliar Rupiah)									
0,10	0,12	0,54	0,1	0,03	0,22	120	120	0,78	28,21

Pada indikator Nilai PNBPN Satker BPPP Banyuwangi, realisasi Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp0,22 miliar dari target Rp0,03 miliar, atau sebesar 120%. Hal ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan layanan dan fasilitas pelatihan yang dikelola oleh BPPP Banyuwangi, serta meningkatnya minat pemangku kepentingan terhadap layanan pelatihan yang diselenggarakan.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai PNBPN BPPP Banyuwangi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2025, nilai PNBPN tercatat sebesar Rp0,1 miliar, meningkat signifikan menjadi Rp0,22 miliar pada tahun 2026 atau 120%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber PNBPN. Capaian ini didukung oleh optimalisasi layanan yang menghasilkan PNBPN serta peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber PNBPN. Capaian ini didukung oleh optimalisasi layanan yang menghasilkan PNBPN serta peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Indikator Kinerja Tahun 2025–2029, target PNBPN untuk tahun 2029 ditetapkan sebesar Rp0,78 miliar. Dengan capaian hingga triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp0,22 miliar, tingkat capaian terhadap target kinerja tahun 2029 mencapai 28,21%. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup signifikan di awal periode, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui strategi optimalisasi PNBPN pada periode selanjutnya.

Realisasi kinerja IK ini Belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Triwulan I Tahun 2026 dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	0,03	0,22	120
2	BPPP Medan	0,01	0,29	120
3	BPPP Tegal	4,05	5,46	120
4	BPPP Ambon	0,03	0,04	120
5	BPPP Bitung	0,06	0,25	120

Berdasarkan perbandingan realisasi IKU 6 (Nilai PNBP) pada Triwulan I Tahun 2026 dengan UPT lingkup BPPSDMKP, seluruh satuan kerja menunjukkan capaian sebesar 120%. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang melebihi target telah dibatasi maksimal sebesar 120% sesuai dengan ketentuan penilaian kinerja yang berlaku. Meskipun secara persentase capaian terlihat sama, terdapat perbedaan signifikan pada nilai realisasi PNBP antar satuan kerja. BPPP Banyuwangi merealisasikan PNBP sebesar 0,22 miliar rupiah dari target 0,03 miliar rupiah. Sementara itu, BPPP Medan mencapai realisasi sebesar 0,29 miliar rupiah dari target 0,01 miliar rupiah, BPPP Tegal sebesar 5,46 miliar rupiah dari target 4,05 miliar rupiah, BPPP Ambon sebesar 0,04 miliar rupiah dari target 0,03 miliar rupiah, dan BPPP Bitung sebesar 0,25 miliar rupiah dari target 0,06 miliar rupiah. Dengan demikian, meskipun seluruh UPT memperoleh capaian maksimal secara persentase, perbandingan kinerja lebih mencerminkan pada besaran kontribusi nilai PNBP yang dihasilkan. Dalam hal ini, BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi yang melampaui target secara signifikan, meskipun secara nominal masih berada di bawah BPPP Tegal yang memiliki skala target dan realisasi yang lebih besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh skala layanan, jenis kegiatan, serta intensitas pemanfaatan fasilitas yang berbeda antar satker.

Sebagian besar PNBP diperoleh melalui pemanfaatan layanan yang diberikan serta ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu juga adanya komitmen pimpinan dengan penandatanganan kontrak kinerja PNBP serta upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pelatihan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU PNBP BPPP Banyuwangi triwulan I Tahun 2026 tercermin dari optimalisasi pemanfaatan



sarana dan prasarana yang telah tersedia, tanpa memerlukan investasi tambahan yang signifikan. Kegiatan yang berkontribusi terhadap PNBPN dilaksanakan dengan memaksimalkan aset eksisting sehingga penggunaan anggaran dapat dikendalikan secara efektif. Selain itu, pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan secara efisien melalui penugasan instruktur dan tenaga teknis sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan layanan. Pengelolaan kegiatan berbasis perencanaan yang terarah memungkinkan peningkatan realisasi PNBPN dengan dukungan sumber daya yang relatif tetap.

Pelaksanaan kegiatan pendukung PNBPN juga didukung oleh tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, sehingga seluruh potensi penerimaan dapat direalisasikan secara optimal. Dengan capaian PNBPN yang melampaui target menggunakan sumber daya yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya pada IKU PNBPN BPPP Banyuwangi triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Kegiatan penunjang yang dilakukan untuk pencapaian kinerja ini antara lain melalui pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana lainnya yang sudah tidak terpakai sehingga pengelolaan aset menjadi lebih tertib dan efisien. Selain itu, dilakukan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia, menyewakan aset kapal Minami dan pemanfaatan kolam bundar untuk kegiatan budidaya lele. Pemanfaatan kolam bundar tersebut tidak hanya mendukung kegiatan pelatihan dan praktik budidaya, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan PNBPN melalui hasil produksi yang bernilai ekonomi. Kegiatan ini tetap berjalan dengan adanya dukungan anggaran DIPA Revisi Maret BPPP Banyuwangi 2026 pada RO 2375.SCC.831.103 anggarannya sebesar Rp. 567.941.000,00 dan pada RO 2375.RAL 711 dengan anggaran Rp 89.943.000,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00.

Indikator Kinerja 7

Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Banyuwangi (Dokumen)

Indikator ini mengukur jumlah dokumen yang memuat hasil identifikasi,

analisis, dan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) pada BPPP Banyuwangi sebagai dasar perencanaan program pengembangan SDM. Indikator kinerja ini memiliki target 1 dokumen dan dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2026. Data dukung capaian ini berupa Dokumen Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dan Surat Usulan Pengembangan kompetensi tenaga pelatih. Secara anggaran, kegiatan ini tidak mendapatkan dukungan anggaran dari DIPA Tahun 2026.

Sasaran Kegiatan 2

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Pada Sasaran kinerja ini, pencapaiannya didukung dengan adanya kegiatan layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi dengan jumlah IKU pendukung sebanyak 8 (delapan) IK. Adapun capaian indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 8

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal pada BPPP Banyuwangi meliputi antara lain layanan keuangan, layanan pengendalian internal, layanan kepegawaian dan layanan pengelolaan BMN. Data dukung capaian IK ini berupa dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik yang ditandatangani pimpinan satker. Dokumen Layanan Manajemen di BPPP Banyuwangi sebanyak 27 Dokumen, yang terdiri dari Laporan SPIP sebanyak 4 Dokumen, rekap realisasi anggaran 12 dokumen, laporan keuangan 2 dokumen, laporan PIPK 1 dokumen, matrik manajemen resiko 4 dokumen, laporan kepegawaian 1 dokumen, RKBMN 1 dokumen dan laporan pengelolaan BMN 2 laporan.

Capaian indikator layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja 8 Triwulan I Tahun 2026

IKU 8-Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)		
Realisasi	2026	Rencana Target Kinerja 2025– 2029

2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	35.71	30.3	25	25	29,63	118,52	18,52	100	29,63

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian IKU 8 yaitu Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 25%, realisasi yang dicapai adalah sebesar 29,63% atau sebesar 118,52%. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan dukungan manajemen internal telah berjalan secara optimal dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh layanan dukungan manajemen internal telah terlaksana secara optimal dan sesuai ketentuan dalam pelaksanaan fungsi dukungan manajemen internal, termasuk aspek administrasi, tata kelola keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 18,52% dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 25%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas dan efektivitas layanan dukungan manajemen internal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembenahan sistem dukungan manajemen memberikan hasil nyata pada tahun berjalan. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan kinerja dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta dukungan administrasi lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan utama organisasi. Selain itu, kontribusi seluruh pegawai dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik juga menjadi faktor penting dalam pencapaian indikator ini.

Jika dibandingkan dengan indikator kinerja 2025-2029 sebesar 100%, capaian pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 29,63%. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik pada awal periode, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja IK belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	25	29,63	118,52
2	BPPP Medan	25	29,63	118,52
3	BPPP Tegal	25	29,63	118,52
4	BPPP Ambon	25	25,93	103,72
5	BPPP Bitung	25	29,63	118,52

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Triwulan I Tahun 2026 dengan UPT lingkup BPPSDMKP, sebagian besar satuan kerja menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. BPPP Banyuwangi mencapai realisasi sebesar 29,63% dari target 25% atau sebesar 118,52%. Capaian yang sama juga ditunjukkan oleh BPPP Medan, BPPP Tegal, dan BPPP Bitung yang masing-masing mencapai 118,52%. Sementara itu, BPPP Ambon mencatat realisasi sebesar 25,93% dari target 25% atau sebesar 103,72%, yang meskipun lebih rendah dibandingkan UPT lainnya, tetap menunjukkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Kesamaan capaian pada beberapa UPT menunjukkan adanya standar kinerja yang relatif seragam dalam pelaksanaan layanan dukungan manajemen internal. Dalam hal ini, BPPP Banyuwangi berada pada kelompok UPT dengan capaian tertinggi, yang mencerminkan bahwa layanan dukungan manajemen internal telah berjalan secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Capaian tersebut didukung oleh efektivitas pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta administrasi perkantoran yang berjalan dengan baik di masing-masing satuan kerja.

Keberhasilan pencapaian IK ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam memperkuat tata kelola organisasi serta peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen. Koordinasi yang baik antarunit kerja serta kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku menjadi faktor utama dalam tercapainya kinerja secara optimal. Selain itu, penerapan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan administrasi yang tertib dan akuntabel turut mendukung kelancaran pelaksanaan layanan dukungan manajemen internal di BPPP Banyuwangi. Capaian keberhasilan karena telah tersusunnya seluruh dokumen laporan dukungan manajemen internal BPPP

Banyuwangi sebanyak 12 dokumen yaitu:

- Laporan SPIP sebanyak 4 dokumen
- Laporan Realisasi Anggaran 3 dokumen
- Laporan Keuangan 1 dokumen
- Laporan PIPK 1 dokumen
- Matrik manajemen risiko sebanyak 1 dokumen
- Laporan Pengelolaan BMN sebanyak 2 dokumen

Pada aspek sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui peningkatan produktivitas pegawai dan penerapan pola kerja yang adaptif. Beberapa pegawai dilibatkan lintas bidang untuk mendukung kegiatan prioritas, sehingga beban kerja dapat tersebar merata tanpa penambahan tenaga baru. Selain itu juga adanya upaya optimalisasi sumber daya manusia dan sarana pendukung yang tersedia tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Pelaksanaan layanan dukungan manajemen dilakukan melalui penguatan koordinasi internal serta pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendukung, sehingga proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien.

IKU ini dapat tercapai berkat adanya dukungan anggaran pada DIPA BPPP Banyuwangi pada RO 2378.EBA dengan target output sebanyak 2 layanan yaitu pelayanan tata usaha dan penyelenggaraan PPID, dan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Selain itu, keberhasilan capaian ini ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan kinerja secara tepat waktu, pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib, serta peningkatan koordinasi dan pembinaan internal. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi manajemen dan aplikasi pendukung turut memperlancar proses administrasi dan pengambilan keputusan sehingga layanan dukungan manajemen dapat berjalan secara optimal.

Indikator Kinerja Utama 9

Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

(Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai IKU ini diperoleh berdasarkan *dashboard* IP ASN pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>. Indikator kinerja ini dilaksanakan pengukuran pada triwulan II dan triwulan IV Tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama 10

Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)

IKU ini merupakan IKU Nilai PM SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker. Nilai PM SAKIP Satker adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM.

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya dengan menghitung nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. Pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri SAKIP di BPPP Banyuwangi dilakukan dengan menjalankan beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Menyusun Dokumen penilaian mandiri SAKIP dari awal tahun sebagai dokumen persyaratan pemenuhan dokumen Kinerja per triwulan
2. Melakukan penyimpanan dokumen penilaian mandiri SAKIP terletak pada *Google Drive* milik BPPP Banyuwangi
3. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap indikator dan pelaporan kinerja

Indikator Kinerja Utama 11

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)

Berdasarkan jumlah rekomendasi hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen KKP pada lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) oleh Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode Tahun 2026 tidak ada temuan atau pun rekomendasi pada BPPP Banyuwangi sehingga persentasenya dianggap senilai 86%. Capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja 11 Triwulan I Tahun 2026

<i>IKU-7 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)</i>									
Realisasi				2026				Rencana Target Kinerja 2025– 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	86	86	100	-	89	96,63

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan I Tahun 2026, menunjukkan kinerja yang optimal. Dari target TW I sebesar 86%, BPPP Banyuwangi berhasil merealisasikan pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan sebesar 86% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Nilai ini didapatkan jika tidak ada temuan rekomendasi pengawasan Itjen, maka nilai maksimal yang didapatkan adalah 86%. Capaian ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi. Capaian ini berdasarkan nota dinas Sekretaris BPPSDM Nomor: 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 9 Janu14 April 2026 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2026 Lingkup BPPSDMKP”. Capaian ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, serta adanya perbaikan tata kelola organisasi yang berkelanjutan. Pemanfaatan rekomendasi pengawasan secara optimal menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan

kualitas kinerja organisasi.

Perlu disampaikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, pengukuran indikator ini tidak dilakukan pada Triwulan I, melainkan menggunakan periode pengukuran tahunan. Pengukuran secara triwulanan baru mulai diterapkan pada tahun 2026, sehingga data capaian pada Triwulan I tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan rencana target kinerja 2025–2029 ditetapkan sebesar 89%, dan realisasi hingga tahun 2025 telah mencapai 96,63%. Dengan demikian, keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi telah berjalan secara fungsional, serta mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Perbandingan realisasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	86	86	100
2	BPPP Medan	86	86	100
3	BPPP Tegal	86	86	100
4	BPPP Ambon	86	86	100
5	BPPP Bitung	86	86	100

Berdasarkan perbandingan realisasi IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan UPT lingkup BPPSDM KP, BPPP Banyuwangi mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini diperoleh karena tidak terdapat temuan hasil pengawasan pada Tahun 2026, sehingga tidak terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dan target pemanfaatan rekomendasi dapat dipenuhi secara optimal.

Kondisi serupa juga terjadi pada BPPP Bitung, BPPP Ambon, dan BPPP Medan, dan BPPP Tegal yang masing-masing mencapai 100%, karena tidak adanya temuan hasil pengawasan pada tahun berjalan. Dengan demikian, capaian BPPP



Banyuwangi sejalan dengan mayoritas UPT lingkup BPPSDM KP dan mencerminkan efektivitas pengendalian internal serta kepatuhan terhadap tata kelola organisasi, dengan variasi capaian yang dipengaruhi oleh ada atau tidaknya temuan hasil pengawasan pada masing-masing satuan kerja.

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam memanfaatkan 100% rekomendasi hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi sama sekali tidak terdapat temuan rekomendasi pengawasan karena terdapat sistem yang baik dalam manajemen tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu adanya respons cepat terhadap temuan pengawasan, baik dari internal maupun eksternal (misalnya dari Itjen), adanya komitmen pimpinan dan tim kerja untuk menjadikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi rutin dan dasar perbaikan sistem, dokumentasi dan pelaporan yang tertib, yang memudahkan pemantauan dan pengukuran efektivitas tindak lanjut, dan koordinasi lintas unit kerja yang berjalan efektif dalam mengimplementasikan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diterima.

Pemanfaatan hasil pengawasan secara penuh berdampak pada efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan adanya perbaikan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi yang menyasar proses kerja yang berisiko pemborosan atau inefisiensi, serta implementasi rekomendasi memperkuat sistem pengendalian internal, yang secara langsung menekan potensi kesalahan, duplikasi kerja, dan inefisiensi anggaran.

Pemanfaatan rekomendasi pengawasan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dimaknai sebagai alat perbaikan manajemen program. IKU Pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan Itjen didukung secara tidak langsung melalui anggaran dukungan manajemen kinerja internal pada RO 2378.EBD dengan jumlah output berupa 2 dokumen layanan, laporan, dan rekomendasi sebesar Rp 2.540.000,00 yang terbagi untuk kegiatan pelayanan perencanaan dan penganggaran pelatihan kelautan dan perikanan, layanan pemantauan evaluasi, dan layanan manajemen keuangan. Alokasi anggaran tersebut memungkinkan satuan kerja melakukan perbaikan administrasi, penyempurnaan prosedur, serta peningkatan kompetensi pengelola sehingga rekomendasi pengawasan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan

kinerja dan tata kelola organisasi. Faktor keberhasilan pelaksanaan program yang berbasis rekomendasi pengawasan dilakukan melalui:

2. Menerapkan sistem monitoring evaluasi berkala yang memastikan bahwa setiap rekomendasi yang masuk dikaji, dijadwalkan tindak lanjutnya, dan dilaporkan progresnya.
3. Membuka diri terhadap kritik dan audit sehingga rekomendasi tidak dianggap sebagai temuan semata, tetapi bagian dari proses peningkatan kinerja.

Menerapkan budaya kerja yang adaptif terhadap pembaruan prosedur, sehingga perbaikan sistem atau SOP dari hasil pengawasan bisa langsung diintegrasikan ke dalam aktivitas unit kerja.

Indikator Kinerja Utama 10

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Capaian indikator ini didasarkan pada Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2025. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja 10 Tahun 2025

IKU-10 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)								
Realisasi			2025				Rencana Target Kinerja 2025– 2029	
2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	80	100	120	-	84	119,05

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2025, BPPP Banyuwangi mencatat capaian 100% dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dari target sebesar 80%, sehingga menghasilkan capaian 120% terhadap target. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh paket pengadaan yang direncanakan telah diumumkan secara terbuka dan tepat waktu melalui sistem yang ditentukan, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Indikator kinerja 2025-2029 untuk indikator ini ditetapkan sebesar 84%, dan pada tahun 2025 capaian telah mencapai 100% atau 119,05% terhadap target. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan publikasi pengadaan telah dilakukan secara proaktif dan melebihi ekspektasi. Capaian ini mencerminkan kedisiplinan unit kerja dalam menyiapkan dokumen pengadaan sejak awal tahun anggaran, serta kesigapan dalam mengintegrasikan seluruh perencanaan ke dalam sistem SIRUP sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	80	100	120,00
2	BPPP Tegal	80	100	120,00
3	BPPP Bitung	80	100	120,00
4	BPPP Ambon	80	100	120,00
5	BPPP Medan	80	100	120,00

Pada tahun 2025, seluruh UPT lingkup BPPSDM KP, termasuk BPPP Banyuwangi, menunjukkan capaian maksimal dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). BPPP Banyuwangi mencatat realisasi sebesar 100% dari target 80% atau mencapai 120% capaian, sama seperti yang dicapai oleh BPPP Tegal, Bitung, Ambon, dan Medan. Keseragaman capaian ini menandakan bahwa seluruh UPT telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan pemerintah. Bagi BPPP Banyuwangi, capaian ini juga mencerminkan bahwa proses perencanaan dan kesiapan pengadaan sudah dilakukan dengan baik sejak awal tahun, sekaligus memperkuat posisi lembaga dalam penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik secara optimal.

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam mencapai 100% pengumuman RUP pada SIRUP dari target 80% (capaian 120%) menunjukkan penerapan manajemen pengadaan yang sangat baik. Faktor-faktor pendukung keberhasilan ini antara lain:

1. Adanya perencanaan awal tahun yang matang dan terintegrasi sehingga seluruh paket pengadaan telah teridentifikasi lebih awal.
2. Koordinasi erat antara perencana anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan tim pengadaan, yang memastikan semua kegiatan terinput dalam sistem tepat waktu.
3. Pemanfaatan sistem SIRUP secara optimal, serta pemahaman SDM terhadap prosedur dan regulasi pengadaan berbasis elektronik.
4. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala, yang mendorong

disiplin waktu dalam pelaksanaan dan pelaporan.

5. Pemahaman regulasi LKPP dan sistem SIRUP yang memadai oleh tim pelaksana pengadaan.

Efisiensi ini tampak dari tidak adanya keterlambatan dalam penginputan RUP, yang secara langsung mengurangi risiko terjadinya tender ulang, keterlambatan realisasi kegiatan, serta potensi pemborosan anggaran. Selain itu, proses dokumentasi pengadaan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi memungkinkan penghematan waktu dan tenaga kerja administratif.

Keberhasilan program pengadaan tahun 2025 secara tidak langsung didukung DIPA BPPP Banyuwangi terkait dengan pengadaan yaitu pada RO 2378.EBA.993.002 layanan perkantoran sebanyak 1 layanan, khususnya dalam kegiatan operasional pemeliharaan kantor. Selain itu, aspek publikasi RUP, ditopang oleh beberapa program yaitu:

1. Mengikuti pelatihan dan pembekalan teknis, khususnya terkait sistem pengadaan berbasis elektronik
2. Pimpinan unit kerja ikut melakukan pengawasan yang menjadikan keterbukaan dalam pengadaan sebagai bagian dari budaya organisasi.

Indikator Kinerja Utama 12

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Capaian indikator ini didasarkan pada Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 tanggal 7 April 2026. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja 12 Triwulan I Tahun 2026

IKU-12 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)								
Realisasi			2026				Rencana Target Kinerja 2025– 2029	
2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	77	100	120	-	84	119,05

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2025, BPPP Banyuwangi mencatat capaian 100% dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dari target sebesar 77%, sehingga menghasilkan capaian 120% terhadap target. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh paket pengadaan yang direncanakan telah diumumkan secara terbuka dan tepat waktu melalui sistem yang ditentukan, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

IKU ini merupakan IKU baru sejak tahun 2025 dan dilakukan pengukuran pada akhir tahun, sedangkan pada tahun ini periode pengukuran dilakukan triwulanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Indikator kinerja 2025-2029 untuk indikator ini ditetapkan sebesar 84%, dan pada tahun 2026 capaian telah mencapai 100% atau 119,05% terhadap target. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan publikasi pengadaan telah dilakukan secara proaktif dan melebihi ekspektasi. Capaian ini mencerminkan kedisiplinan unit kerja dalam menyiapkan dokumen pengadaan sejak awal tahun anggaran, serta kesiapan dalam mengintegrasikan seluruh perencanaan ke dalam sistem SIRUP sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional

karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	77	100	120
2	BPPP Medan	77	100	120
3	BPPP Tegal	77	100	120
4	BPPP Ambon	77	100	120
5	BPPP Bitung	77	100	120

Pada triwulan I tahun 2026, seluruh UPT lingkup BPPSDM KP, termasuk BPPP Banyuwangi, menunjukkan capaian maksimal dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). BPPP Banyuwangi mencatat realisasi sebesar 100% dari target 77% atau mencapai 120% capaian, sama seperti yang dicapai oleh BPPP Tegal, Bitung, Ambon, dan Medan. Keseragaman capaian ini menandakan bahwa seluruh UPT telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan pemerintah. Bagi BPPP Banyuwangi, capaian ini juga mencerminkan bahwa proses perencanaan dan kesiapan pengadaan sudah dilakukan dengan baik sejak awal tahun, sekaligus memperkuat posisi lembaga dalam penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik secara optimal.

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam mencapai 100% pengumuman RUP pada SIRUP dari target 77% (capaian 120%) menunjukkan penerapan manajemen pengadaan yang sangat baik. Faktor-faktor pendukung keberhasilan ini antara lain:

1. Adanya perencanaan awal tahun yang matang dan terintegrasi sehingga seluruh paket pengadaan telah teridentifikasi lebih awal.
2. Koordinasi erat antara perencana anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan tim pengadaan, yang memastikan semua kegiatan terinput dalam sistem tepat waktu.

3. Pemanfaatan sistem SIRUP secara optimal, serta pemahaman SDM terhadap prosedur dan regulasi pengadaan berbasis elektronik.
4. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala, yang mendorong disiplin waktu dalam pelaksanaan dan pelaporan.
5. Pemahaman regulasi LKPP dan sistem SIRUP yang memadai oleh tim pelaksana pengadaan.

Efisiensi ini tampak dari tidak adanya keterlambatan dalam penginputan RUP, yang secara langsung mengurangi risiko terjadinya tender ulang, keterlambatan realisasi kegiatan, serta potensi pemborosan anggaran. Selain itu, proses dokumentasi pengadaan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi memungkinkan penghematan waktu dan tenaga kerja administratif.

Keberhasilan program pengadaan tahun 2026 secara tidak langsung didukung DIPA BPPP Banyuwangi terkait dengan pengadaan yaitu pada RO 2378.EBA.993.002 layanan perkantoran sebanyak 1 layanan, khususnya dalam kegiatan operasional pemeliharaan kantor. Selain itu, aspek publikasi RUP, ditopang oleh beberapa program yaitu:

1. Mengikuti pelatihan dan pembekalan teknis, khususnya terkait sistem pengadaan berbasis elektronik
2. Pimpinan unit kerja ikut melakukan pengawasan yang menjadikan keterbukaan dalam pengadaan sebagai bagian dari budaya organisasi

Indikator Kinerja Utama 13

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Banyuwangi (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan

kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon II diperoleh dari nilai unit kearsipan III.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)

- a. penciptaan arsip (25%),
- b. penggunaan arsip (25%),
- c. pemeliharaan arsip (25%)
- d. penyusutan arsip (25%)

Sumber daya kearsipan (bobot 50%)

- a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
- b. prasarana dan sarana (50%)

Indikator kinerja ini merupakan IK baru pada tahun ini dan pengukuran dilakukan di akhir tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama 14

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)

IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (nilai) merupakan salah satu IKU dalam Pencapaian sasaran strategis terpenuhinya layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi. IKU ini berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. Pencapaian indikator ini berdasarkan penginputan perencanaan pada aplikasi OMSPAN. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan pada akhir tahun 2026. Guna mencapai keberhasilan indikator ini BPPP Banyuwangi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pada masing-masing indikator yang merupakan IKU

tahunan.

Kegiatan penunjang yang berkontribusi terhadap pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara rutin, peningkatan koordinasi antara pejabat perbendaharaan dan unit pelaksana kegiatan, serta pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan negara secara konsisten. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menjaga disiplin pelaksanaan anggaran turut memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif dan akuntabel. Selain itu juga melakukan pembahasan monitoring data kontrak, monitoring uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan serta pembahasan deviasi halaman IIII DIPA. Anggaran pendukung kegiatan ini terdapat dalam RO 2378.EBD.955.401 yaitu Layanan Manajemen Keuangan.

Indikator Kinerja Utama 15

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (nilai) merupakan salah satu IKU dalam Pencapaian sasaran strategis terpenuhinya layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi. merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan anggaran, yang mencakup aspek konsistensi perencanaan, ketepatan pengalokasian anggaran, keselarasan dengan dokumen perencanaan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran indikator capaian IK ini dilaksanakan di akhir tahun 2026.

Pelaksanaan perencanaan anggaran di BPPP Banyuwangi dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan melalui pemanfaatan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, sehingga proses perencanaan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Efisiensi ini tercermin dari kemampuan mempertahankan capaian nilai maksimal dengan sumber daya yang relatif tetap.

Kegiatan penunjang yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain penyusunan dan reviu dokumen perencanaan anggaran secara berkala, penyelarasan program dan kegiatan antar unit kerja, serta pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran. Kegiatan tersebut memastikan bahwa

perencanaan anggaran di BPPP Banyuwangi disusun secara sistematis, terukur, dan konsisten dengan sasaran strategis organisasi. IKU ini didukung dengan DIPA BPPP Banyuwangi pada RO 2378.EBD.952 yaitu pelayanan perencanaan dan penganggaran pelatihan kelautan dan perikanan dengan target output sebanyak 1 dokumen.

Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran program ini, pencapaiannya didukung dengan adanya kegiatan penyuluhan dengan jumlah IKU pendukung sebanyak 6 IKU dan dukungan anggaran dari BPPP Banyuwangi dengan pagu sebesar Rp. 96.297.993.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 23.413.360.319,00 dengan persentase sebesar 24,3%. Adapun capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 14

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, dengan formula perhitungan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012. IKU ini didukung dengan anggaran dengan pagu Rp. 96.297.993.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 23.413.360.319,00 dengan persentase sebesar 24,3%. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Banyuwangi triwulan I Tahun 2026 diperoleh dari sumber Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi yang telah dilakukan verifikasi dan validasi data dukung oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Capaian indikator Kinerja 16 Triwulan I Tahun 2026

IKU 16- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)									
Realisasi				2026				Rencana Target Kinerja 2025– 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	7	3	5	6	120	100	304	1,97

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi jumlah Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Banyuwangi mencapai 6 kelompok dari target 5 kelompok dengan persentase capaian sebesar 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelompok telah melampaui target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 3 kelompok. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pembinaan dan penguatan kapasitas kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung.

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan target rencana kinerja 2025-2029, dengan target akhir 2029 sebesar 304 kelompok maka capaian tahun 2025 tercapai 1,97%. Meskipun secara persentase masih relatif kecil, capaian ini merupakan awal yang positif sehingga perlu ditingkatkan melalui penguatan strategi pembinaan dan perluasan jangkauan program pada periode selanjutnya.

Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP, Realisasi kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	5	6	120,00
2	BPPP Bitung	1	2	120,00
3	BPPP Ambon	10	13	120,00

Berdasarkan perbandingan antar satker, BPPP Banyuwangi mencatat capaian 120%, sejajar dengan BPPP Bitung, dan BPPP Ambon yang juga mencapai

120%. BPPP Banyuwangi merealisasikan peningkatan kelas pada 6 kelompok dari target 5 kelompok. Sementara itu, BPPP Bitung merealisasikan 2 kelompok dari target 1 kelompok, dan BPPP Ambon merealisasikan 13 kelompok dari target 10 kelompok. Meskipun secara persentase capaian seluruh UPT menunjukkan nilai yang sama, perbedaan kinerja dapat dilihat dari jumlah realisasi kelompok yang berhasil ditingkatkan kelasnya. Dalam hal ini, BPPP Ambon menunjukkan realisasi tertinggi secara jumlah, diikuti oleh BPPP Banyuwangi dan BPPP Bitung. Capaian ini menunjukkan bahwa masing-masing UPT telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan kelompok secara efektif, serta mampu mendorong peningkatan kapasitas kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sesuai dengan target yang telah ditetapkan..

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh adanya regulasi dan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok. Salah satu faktor utama adalah Peraturan Kepala BRSDM KP Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan PPTK, dan Penyuluh Perikanan Bantu, yang memberikan kejelasan peran, tugas, dan mekanisme kerja penyuluh dalam mendampingi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Selain itu, tersedianya Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sangat membantu penyuluh perikanan dalam melaksanakan pendampingan secara terarah dan sistematis, khususnya dalam proses peningkatan kelas kelompok. Kombinasi antara regulasi yang jelas dan pedoman teknis yang memadai tersebut berkontribusi signifikan terhadap optimalnya pelaksanaan kegiatan dan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerjadan BOP penyuluh PNS dan Honor serta BOP PPB dapat terealisasi secara optimal dengan terpenuhinya target kinerja yang telah ditentukan
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus

dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascade langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

3. Program dilakukan berbasis data dan kebutuhan, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan tidak menghabiskan sumber daya secara sia-sia. Dalam banyak kasus, penyuluhan peningkatan kelas dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan teknis lainnya, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi penyuluh

Analisis Program/Faktor Keberhasilan, dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah dengan dilakukannya penilaian kelas kelompok sehingga diperoleh skor penilaian yang akan menentukan naik tidaknya kelas kelompok. Peningkatan kelas kelompok naik dimulai dari pemula ke madya dan madya ke utama. Secara eksplisit, IKU ini tidak didukung RO pada DIPA BPPP Banyuwangi, namun secara tidak langsung peran penyuluh dalam peningkatan kelas kelompok dilakukan bersama pada saat melakukan penyuluhan sehingga secara tidak langsung IKU ini didukung oleh RO 7020.QDD.646 yaitu Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Namun untuk outputnya tidak bisa diklaim untuk capaian RO ini karena sudah ada output dari IKU kelompok pelaku usaha dan atau pelaku pendukung yang disuluh.

Indikator Kinerja Utama 15

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Dengan format perhitungan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh oleh penyuluh perikanan. IKU ini didukung oleh anggaran dengan pagu Rp. 96.297.993.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 23.413.360.319,00 dengan

persentase sebesar 24,3%. Pencapaian IK Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh pada triwulan I Tahun 2026 diperoleh dari sumber Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi yang telah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Indikator kinerja Utama 17 Triwulan I Tahun 2026

IKU 17- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (Kelompok)									
Realisasi TW IV				2026				Rencana Target Kinerja 2025– 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
1.595	1.300	2.549	1.00	1.000	1.100	110	10	9.134	12,04

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian IKU 17 yaitu Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh oleh BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 1.000 kelompok, realisasi yang dicapai adalah 1.100 kelompok atau sebesar 110%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan telah berjalan efektif dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi triwulan I tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.000 kelompok. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan peran penyuluh perikanan dalam menjangkau lebih banyak kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung, serta meningkatnya intensitas dan cakupan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh BPPP Banyuwangi.

Indikator kinerja Tahun 2025-2029 untuk IKU ini ditetapkan sebesar 9.134 kelompok. Persentase capaian terhadap target 2029 dicapai sebesar 12,04%. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang selaras dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan walaupun masih diperlukan akselerasi program penyuluhan dalam periode 2026–2029 agar target akhir Renstra dapat tercapai.

Realisasi IK ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	1000	1100	110,00
2	BPPP Medan	500	661	120,00
3	BPPP Ambon	500	510	102,00
4	BPPP Bitung	50	60	120,00

Berdasarkan perbandingan realisasi IKU 17 pada Triwulan I Tahun 2026 dengan UPT lingkup BPPSDMKP, seluruh satuan kerja menunjukkan capaian kinerja yang baik dengan realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. BPPP Banyuwangi mencapai realisasi sebesar 1.100 kelompok dari target 1.000 kelompok atau sebesar 110,00%. Jika dibandingkan dengan UPT lainnya, BPPP Medan mencatat capaian tertinggi sebesar 120,00% (661 kelompok dari target 500 kelompok), diikuti oleh BPPP Bitung sebesar 120,00% (60 kelompok dari target 50 kelompok), dan BPPP Banyuwangi sebesar 110,00%. Sementara itu, BPPP Ambon mencapai capaian sebesar 102,00% (510 kelompok dari target 500 kelompok). Dari sisi jumlah realisasi, BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang paling tinggi dengan capaian 1.100 kelompok, yang mencerminkan jangkauan penyuluhan yang lebih luas dibandingkan UPT lainnya. Namun demikian, dari sisi persentase capaian terhadap target, BPPP Banyuwangi berada di bawah BPPP Medan dan BPPP Bitung. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa seluruh UPT telah melaksanakan kegiatan penyuluhan secara efektif dalam meningkatkan kapasitas kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung, dengan karakteristik capaian yang berbeda baik dari sisi skala maupun efektivitas pencapaian target.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh ketersediaan dan peran aktif penyuluh perikanan dalam melakukan pendampingan kelompok secara berkelanjutan. Adanya sinergi yang baik antara BPPP Banyuwangi dengan pemerintah daerah, kelembagaan kelompok perikanan, serta pelaku usaha turut

memperkuat pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pendekatan penyuluhan yang adaptif terhadap kebutuhan kelompok juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah kelompok yang berhasil disuluh. Selain itu, juga adanya kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan melakukan evaluasi kinerja penyuluh melalui laporan kegiatan penyuluhan yang disertakan dengan data dukung dan SKP beserta dokumennya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja dan BOP penyuluh PNS dan Honor serta BOP PPB dapat terealisasi secara optimal dengan terpenuhinya target kinerja yang telah ditentukan
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang ter-*cascading* langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah telah dilakukannya pendampingan terhadap kelompok binaannya seperti pendampingan dalam bantuan modal, bantuan pemerintah, pendampingan dalam kemitraan/pasar, pendampingan penginputan atau pendaftaran KUSUKA, pendampingan penilaian kelas kelompok dan peningkatan kelas kelompok. IKU ini didukung oleh RO 7020.QDD.646 yaitu Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang terlaksana belum melampaui target RO yaitu 6.033 kelompok dicapai 1.100 kelompok (18,23%).

Indikator Kinerja Utama 18

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)

IK Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama

Perikanan dengan formula perhitungan Jumlah kelompok Pelaku usaha yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok. Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok) sumber data diperoleh dari Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi dan capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja 18 Triwulan I Tahun 2026

IKU 18- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)									
Realisasi				2026				Rencana Target Kinerja 2025– 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
6	78	70	30	25	35	120	16,67	600	5,83

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian IKU 18 yaitu Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 25 kelompok, realisasi yang dicapai adalah 35 kelompok. Capaian ini menunjukkan bahwa pembentukan kelompok baru telah melampaui target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 5,83% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 30 kelompok. Peningkatan ini mencerminkan semakin intensifnya kegiatan penumbuhan kelompok melalui pendampingan penyuluh perikanan.

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan target kinerja 2025-2029 ditetapkan sebesar 600 kelompok, sementara realisasi triwulan I mencapai 35 kelompok. Dengan demikian, capaian kinerja terhadap indikator kinerja 2025-2029 sebesar 5,83% merupakan langkah awal yang positif sehingga perlu terus ditingkatkan melalui penguatan strategi pembinaan dan perluasan jangkauan program pada periode selanjutnya. Strategi pembinaan berbasis perluasan akses kelompok berjalan efektif sehingga perlu diimbangi dengan kualitas pembinaan agar tidak terjadi kesenjangan antara jumlah kelompok yang dibentuk (IKU 18) dengan kelompok yang naik kelas (IKU 16).

Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP Realisasi IK belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	25	35	120
2	BPPP Medan	20	24	120
3	BPPP Ambon	20	24	120
4	BPPP Bitung	1	2	120

Dibandingkan dengan UPT lain di lingkup BPPSDM KP, seluruh satuan kerja yang dibandingkan menunjukkan capaian sebesar 120%. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang melebihi target telah dibatasi maksimal sebesar 120% sesuai dengan ketentuan penilaian kinerja yang berlaku. BPPP Banyuwangi merealisasikan pembentukan 35 kelompok dari target 25 kelompok. Sementara itu, BPPP Medan dan BPPP Ambon masing-masing merealisasikan 24 kelompok dari target 20 kelompok, serta BPPP Bitung merealisasikan 2 kelompok dari target 1 kelompok. Meskipun secara persentase capaian seluruh UPT menunjukkan nilai yang sama, perbedaan kinerja dapat dilihat dari jumlah realisasi kelompok yang berhasil dibentuk. Dalam hal ini, BPPP Banyuwangi menunjukkan realisasi tertinggi dengan capaian 35 kelompok, diikuti oleh BPPP Medan dan BPPP Ambon, serta BPPP Bitung. Capaian ini menunjukkan bahwa masing-masing UPT telah melaksanakan kegiatan pembentukan kelompok secara efektif, serta mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelautan dan perikanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Analisis Keberhasilan/Faktor Penunjang Keberhasilan, keberhasilan pembentukan 35 kelompok atau 120% capaian terhadap target triwulan I menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berhasil menjalankan program ini secara efektif. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung utama antara lain:

1. Adanya Peraturan Kepala BRSDM KP Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan



PPTK, dan Penyuluh Perikanan Bantu

2. Tersedianya Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama turut mendukung penguatan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan
3. Ketersediaan basis data masyarakat sasaran yang telah dipetakan lebih awal, memudahkan proses identifikasi dan mobilisasi pembentukan kelompok.
4. Pendekatan partisipatif penyuluh yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses pembentukan, menciptakan rasa kepemilikan di tingkat akar rumput.
5. Adanya sinergi dengan program lain seperti pelatihan, bantuan sarana, dan fasilitasi pemasaran yang memperkuat minat masyarakat untuk membentuk kelompok formal.
6. Komitmen manajemen dan dukungan lintas sektor, seperti Dinas KP daerah dan lembaga pendukung usaha, yang mempercepat proses legalisasi dan pengorganisasian kelompok.
7. Kesadaran Pelaku utama/ Pelaku usaha KP tentang pentingnya membentuk kelompok terkait kemudahan akses untuk mendapatkan bantuan, pemodalan usaha dan kegiatan pelatihan

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya, capaian yang tinggi dapat dicapai dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun tenaga pendamping. Beberapa bentuk efisiensi yang tampak adalah:

1. Integrasi kegiatan pembentukan kelompok dengan program lainnya, seperti pelatihan atau pendampingan budidaya, sehingga pelaksanaannya hemat biaya dan waktu.
2. Pemanfaatan tenaga penyuluh lokal dan jejaring kelompok eksisting yang membantu memfasilitasi terbentuknya kelompok baru tanpa biaya tambahan.
3. Digitalisasi pelaporan dan koordinasi memungkinkan pemantauan pembentukan kelompok dilakukan lebih cepat dan efisien.
4. Adanya efisiensi sumberdaya manusia dalam kegiatan penumbuhan kelompok yaitu aparat desa (lurah) , pelaku utama/usaha perikanan, dan penyuluh

Analisis Program /faktor keberhasilan dari sisi program, IKU ini tidak didukung RO pada DIPA BPPP Banyuwangi, namun secara tidak langsung peran penyuluh dalam peningkatan kelas kelompok dilakukan bersama pada saat melakukan penyuluhan sehingga secara tidak langsung IKU ini didukung oleh RO 7020.QDD.646 yaitu Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Namun untuk outputnya tidak bisa diklaim untuk capaian RO ini karena sudah ada output dari IKU kelompok pelaku usaha dan atau pelaku pendukung yang disuluh. Keberhasilan capaian output IKU ini juga ditopang oleh desain kegiatan yang selaras dengan target rencana kinerja BPPP Banyuwangi dan kebijakan KKP, yang menargetkan penguatan kelembagaan masyarakat KP. Faktor keberhasilan lainnya mencakup:

1. Penyesuaian metode pembentukan kelompok dengan karakteristik lokal sehingga program lebih diterima oleh masyarakat sasaran.
2. Ketersediaan format baku dan SOP pembentukan kelompok, yang memudahkan proses administrasi dan legalisasi kelompok baru.
3. Ketersediaan insentif tidak langsung, seperti peluang menerima bantuan atau mengikuti pelatihan, yang mendorong masyarakat membentuk kelompok secara sukarela.
4. Pendampingan pasca-pembentukan, yang menunjukkan bahwa kelompok tidak hanya dibentuk untuk memenuhi target, tetapi juga diarahkan agar berkelanjutan dan produktif.
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka percepatan pembentukan kelompok.

Total pengurus dan anggota kelompok yang dibentuk sebanyak 385 orang, terdiri dari 328 laki-laki (85,20%) dan 71 perempuan (18,44%). Persentase ini menunjukkan bahwa hampir seperlima anggota kelompok baru adalah perempuan.

Indikator Kinerja Utama 19

Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukan jumlah Gabungan

kelompok dan atau koperasi merah putih yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP No 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Formula perhitungan untuk IKU ini yaitu Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit).

Tabel 26. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit)

IKU 16. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit)									
Realisasi				2026				Rencana Target Kinerja 2025– 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	3	15	17	113,33	466,67	69	24,64

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 15 unit, realisasi yang dicapai adalah 17 unit atau sebesar 113,33%. Capaian ini menunjukkan pelaksanaan pendampingan kelembagaan ekonomi pelaku usaha perikanan telah berjalan sangat optimal.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya, Indikator ini merupakan IKU baru yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025, sehingga belum terdapat data pembanding dari tahun-tahun sebelumnya (2022–2024). Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi tahun 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 466,67% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 3 unit. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan pendampingan kelompok dan koperasi, khususnya dalam mendukung penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan.

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan rencana target kinerja 2025-2029 di akhir tahun 2029 adalah 69 unit, sedangkan realisasi mencapai 17 unit sehingga persentase capaian sebesar 24,64%. Capaian ini

menunjukkan progres yang cukup baik pada awal periode, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP, realisasi IK ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai sehingga perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	15	17	113,33
2	BPPP Medan	4	10	120,00
3	BPPP Ambon	5	6	120,00
4	BPPP Bitung	1	1	100,00

Berdasarkan perbandingan realisasi indikator Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mendapatkan pendampingan pada Triwulan I Tahun 2026, masing-masing UPT menunjukkan capaian kinerja yang baik dengan realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. BPPP Banyuwangi mencapai realisasi sebesar 17 unit dari target 15 unit atau sebesar 113,33%. Jika dibandingkan dengan UPT lainnya, BPPP Medan dan BPPP Ambon masing-masing mencapai capaian sebesar 120,00%, sedangkan BPPP Bitung mencapai 100,00%. Meskipun secara persentase capaian BPPP Banyuwangi berada di bawah BPPP Medan dan BPPP Ambon, namun tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik karena telah melampaui target yang ditetapkan. Dari sisi jumlah realisasi, BPPP Banyuwangi merupakan yang tertinggi dengan capaian 17 unit, diikuti oleh BPPP Medan sebanyak 10 unit, BPPP Ambon sebanyak 6 unit, dan BPPP Bitung sebanyak 1 unit. Hal ini menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi memiliki kontribusi terbesar dalam pelaksanaan pendampingan kelompok dan/atau koperasi dibandingkan UPT lainnya. Secara umum, capaian ini mencerminkan bahwa seluruh UPT telah melaksanakan kegiatan pendampingan secara efektif dalam mendukung penguatan kelembagaan kelompok dan koperasi di tingkat desa/kelurahan, dengan karakteristik capaian yang berbeda baik dari sisi skala maupun efektivitas pencapaian target.



Analisis Keberhasilan/Faktor Penunjang Keberhasilan, BPPP Banyuwangi dalam mencapai target pendampingan kelembagaan ekonomi masyarakat KP pada tahun 2026 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung. Pertama, adanya pemanfaatan basis data kelembagaan eksisting, seperti koperasi nelayan, Koperasi Desa Merah Putih, dan gabungan kelompok usaha (Gapokkan), yang telah teridentifikasi dan siap didampingi. Kedua, ketersediaan penyuluh dan fasilitator yang memahami pendekatan kelembagaan dan bisnis, menjadi motor penggerak dalam mendorong lembaga tersebut menuju arah penguatan kapasitas manajemen dan usaha. Ketiga, dukungan lintas sektor, baik dari Dinas KP daerah, koperasi, maupun mitra usaha, mempercepat intervensi dalam bentuk pelatihan, fasilitasi legalitas, atau akses pemasaran. Keempat, adanya komitmen internal manajemen satker dalam menjadikan penguatan kelembagaan ekonomi sebagai program prioritas di awal tahun.

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya, Keberhasilan pembentukan 17 kelompok atau 113,33% capaian terhadap target triwulan I tahun 2026 menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berhasil menjalankan program ini secara efektif. Pencapaian kinerja yang melampaui target menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya, terutama SDM penyuluh perikanan, telah dilakukan secara efisien. Pendampingan terhadap gabungan kelompok, koperasi, dan korporasi dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan penyuluhan rutin, sehingga tidak memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Faktor pendukung lainnya antara lain:

1. Ketersediaan basis data masyarakat sasaran yang telah dipetakan lebih awal, memudahkan proses identifikasi dan mobilisasi pembentukan kelompok.
2. Pendekatan partisipatif penyuluh yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses pembentukan, menciptakan rasa kepemilikan di tingkat akar rumput.
3. Adanya sinergi dengan program lain seperti pelatihan, bantuan sarana, dan fasilitasi pemasaran yang memperkuat minat masyarakat untuk membentuk kelompok formal.
4. Komitmen manajemen dan dukungan lintas sektor, seperti Dinas KP daerah

dan lembaga pendukung usaha, yang mempercepat proses legalisasi dan pengorganisasian kelompok.

IKU ini tidak didukung RO pada DIPA BPPP Banyuwangi, namun secara tidak langsung peran penyuluh dalam peningkatan kelas kelompok dilakukan bersama pada saat melakukan penyuluhan sehingga secara tidak langsung IKU ini didukung oleh RO 7020.QDD.646 yaitu Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Namun untuk outputnya tidak bisa diklaim untuk capaian RO ini karena sudah ada output dari IKU kelompok pelaku usaha dan atau pelaku pendukung yang disuluh. Keberhasilan capaian program ini tidak lepas dari perencanaan kegiatan yang terarah serta pelaksanaan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan. Beberapa faktor penunjang keberhasilan meliputi:

- (1) pemanfaatan aset yang optimal untuk mendukung layanan;
- (2) Koordinasi yang baik dengan UPT lain, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait sehingga mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan
- (3) Melakukan komitmen manajemen untuk mencapai target kinerja melalui monitoring dan evaluasi yang rutin.

Pada IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit), komposisi jenis kelamin ketua masih didominasi laki-laki. Dari total 17 unit, 15 ketua (88,26%) adalah laki-laki, sementara 2 orang ketua (11,76%) perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses posisi kepemimpinan kelembagaan ekonomi perikanan, meskipun berperan aktif dalam kegiatan operasional dan usaha rumah tangga perikanan.

Indikator Kinerja Utama 20

Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Banyuwangi (Paket)

Indikator ini mengukur jumlah media penyuluhan yang disusun dan disebarluaskan oleh Satker BPPP Banyuwangi dalam bentuk paket yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Materi Penyuluhan adalah isi atau substansi pengetahuan, informasi, keterampilan

atau sikap yang disampaikan oleh Penyuluh kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas mereka secara berkelanjutan. Materi Penyuluhan terdiri atas: 1. pengembangan sumber daya manusia; 2. peningkatan modal sosial budaya; 3. ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. informasi; 5. ekonomi; 6. manajemen; 7. hukum; dan 8. pelestarian lingkungan.

Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik yang digunakan oleh Penyuluh untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, keterampilan, atau perubahan sikap dan perilaku kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung. Metode Penyuluhan dikelompokkan berdasarkan: 1. tujuan penyuluhan; 2. jumlah sasaran; 3. media yang digunakan; dan 4. teknik komunikasi. Penyusunan Materi dan/atau Metode Penyuluhan yang terstandar mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Materi penyuluhan terstandar yang disusun dan ditetapkan dapat diakses pada laman *Knowledge Management System* (KMS) <https://sites.google.com/view/pelaksanaan-penyuluhan-kp/beranda>. IKU ini baru sejak tahun 2025 dan dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2026.

Peran aktif BPPP Banyuwangi sebagai penyusun dan pembuat media penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Penyusunan media didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan penyuluhan di lapangan, sehingga materi yang disampaikan relevan dan aplikatif. Selain itu, dukungan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis perikanan dan penyuluhan, ketersediaan sarana pendukung produksi media, serta pemanfaatan *platform digital* turut mempercepat proses penyusunan dan penyebarluasan media penyuluhan. Sinergi antar unit kerja dalam proses perencanaan, produksi, dan diseminasi media juga menjadi faktor penting dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja ini.

Penyusunan dan diseminasi media penyuluhan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, termasuk SDM penyuluh yang memiliki kompetensi teknis dan komunikasi. Penggunaan media digital juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran, karena memungkinkan jangkauan sasaran yang lebih luas tanpa memerlukan biaya

produksi dan distribusi yang besar

Kegiatan penunjang pencapaian IK ini meliputi identifikasi kebutuhan penyuluhan di lapangan, pengembangan materi penyuluhan yang kontekstual, pemanfaatan platform digital untuk penyebarluasan media, serta koordinasi internal antara penyuluh dan pengelola program. Kegiatan tersebut mendukung tersusunnya paket media penyuluhan yang relevan dan tepat sasaran. IK ini tetap terlaksana walaupun tanpa adanya dukungan RO pada DIPA BPPP Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.

Indikator Kinerja Utama 21

Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)

Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam meningkatkan profesionalitas dan kompetensi penyuluh perikanan. Penilaian kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyuluh perikanan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, sehingga mampu melaksanakan tugas penyuluhan secara efektif dan berkelanjutan. Indikator ini baru mulai diterapkan pada Tahun 2025, sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia penyuluhan perikanan. Melalui indikator ini, BPPP Banyuwangi berkomitmen untuk mendorong peningkatan mutu penyuluh perikanan melalui fasilitasi penilaian kompetensi secara terencana dan berkesinambungan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Indikator ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2026. Data dukung capaian IK ini berupa Data Penyuluh Perikanan yang mengikuti dan lulus Uji Kompetensi beserta link Sertifikat dan/atau Surat Keterangan dari Biro SDMAO KKP.

Pelaksanaan penilaian kompetensi penyuluh perikanan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pemanfaatan SDM internal, koordinasi yang efektif dengan pihak penilai, serta perencanaan kegiatan yang terarah memungkinkan pencapaian target tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program penilaian kompetensi telah dilakukan secara efisien dan

efektif.

Kegiatan penunjang yang dilakukan antara lain fasilitasi pendaftaran penilaian kompetensi bagi penyuluh perikanan, pendampingan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, serta koordinasi dengan UPT pelaksana penilaian kompetensi. Selain itu, dilakukan pembinaan dan motivasi kepada penyuluh perikanan agar siap mengikuti proses penilaian dan meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan. Kegiatan ini tetap terlaksana walaupun tanpa ada dukungan anggaran pada RO DIPA BPPP Banyuwangi tahun 2026.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2026

3.3.1 Realisasi Anggaran

Berdasarkan data laporan realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) per 31 Maret 2026, BPPP Banyuwangi mencatatkan kinerja penyerapan anggaran yang masih rendah. Realisasi anggaran BPPP Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp27.375.687.684 dari total pagu Rp118.965.319.000 atau sebesar 23,01%. Capaian ini merupakan kondisi umum pada awal tahun anggaran. Rincian lebih lanjut mengenai distribusi realisasi anggaran tersebut pada masing-masing komponen kegiatan dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 28. Realisasi Anggaran BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
I. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan				
1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	0	0	-
2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Banyuwangi yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	0	0	-
3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	4.713.810.000	1.546.800	0,03

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Banyuwangi (dokumen)	0	0	-
5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi (proposal)	0	0	-
6	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	657.884.000	0	0,00
7	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Banyuwangi (Dokumen)	0	0	-
II. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				
8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	15.067.000	5.349.077	35,50
9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	11.876.364.000	2.858.568.158	24,07
10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	2.540.000	0	0
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Banyuwangi (%)	0	0	-
12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	3.011.859.000,00	571.259.198	18,97
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Banyuwangi (Nilai)	0	-	-
14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	4.210.000		0
15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	0		-
III. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
16	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	520.971.000	1.027.094	0,20
17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	1.706.520.000	517.077.038	30,30
18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	14.412.000	0	0
19	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit)	108.247.000	7500000	6,93
20	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Banyuwangi (Paket)	35.442.000	0	0
21	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	96.297.993.000	23413360319	24,31
JUMLAH		118.965.319.000	27.375.687.684	23,01

Sumber: Website SAKTI

Pada sasaran terselenggaranya pelatihan kelautan dan perikanan, realisasi anggaran masih sangat minim. Indikator masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih baru terealisasi Rp1.546.800 dari pagu Rp4.713.810.000 atau sebesar 0,03%. Sementara itu, indikator nilai PNPB belum menunjukkan realisasi (Rp0 dari pagu Rp657.884.000 atau 0,00%). Beberapa indikator lainnya juga belum memiliki alokasi atau realisasi anggaran (0%), seperti penyusunan naskah pelatihan, proposal inovasi, dan penyiapan data kebutuhan kompetensi tenaga pelatih. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan masih berada pada tahap persiapan.

Pada sasaran tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, realisasi anggaran menunjukkan progres awal. Indikator layanan dukungan manajemen

internal telah terealisasi sebesar Rp5.349.077 dari pagu Rp15.067.000 atau 35,50%, sedangkan Indeks Profesionalitas ASN terealisasi Rp2.858.568.158 dari pagu Rp11.876.364.000 atau 24,07%. Indikator SIRUP juga menunjukkan progres dengan realisasi Rp571.259.198 dari pagu Rp3.011.859.000 atau 18,97%. Sementara itu, indikator lain seperti SAKIP masih 0% (Rp0 dari pagu Rp2.540.000), dan beberapa indikator tidak memiliki alokasi anggaran atau belum terealisasi.

Pada sasaran penyuluhan kelautan dan perikanan, realisasi anggaran juga bervariasi. Indikator kelompok yang disuluh menunjukkan realisasi cukup tinggi yaitu Rp517.077.038 dari pagu Rp1.706.520.000 atau 30,30%. Indikator penyuluh perikanan yang lulus penilaian kompetensi terealisasi Rp23.413.360.319 dari pagu Rp96.297.993.000 atau 24,31%, yang menjadi komponen terbesar dalam penyerapan anggaran. Sementara itu, indikator kelompok yang ditingkatkan kelasnya baru terealisasi Rp1.027.094 dari pagu Rp520.971.000 atau 0,20%, dan indikator pendampingan koperasi merah putih sebesar Rp7.500.000 dari pagu Rp108.247.000 atau 6,93%. Adapun indikator kelompok yang dibentuk serta media penyuluhan terstandar masih belum terealisasi (0%).

Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 sebesar 23,01% menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih berada pada tahap awal. Beberapa kegiatan utama, khususnya pada pelatihan dan penyusunan dokumen, belum berjalan optimal karena masih dalam proses persiapan. Sementara itu, kegiatan penyuluhan dan dukungan manajemen sudah mulai menunjukkan progres dengan tingkat realisasi antara 18,97% hingga 35,50%. Ke depan, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan merata pada triwulan berikutnya.

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPP Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran

(*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

Tabel 29. Efisiensi Anggaran BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi Anggaran (%)
I. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan						

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	111,43	0	0	-	-
2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Banyuwangi yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	-	0	0	-	-
3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	120	4.713.810.000	1.546.800	0,03	119,97
4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Banyuwangi (dokumen)	-	0	0	-	-
5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi (proposal)	-	0	0	-	-
6	Nilai PNPB Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	120	657.884.000	0	0,00	120,00
7	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Banyuwangi (Dokumen)	-	0	0	-	-
II. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						
8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	29,63	15.067.000	5.349.077	35,50	-5,87194
9	Indeks Profesionalitas ASN	-	11.876.364.000	2.858.568.158	24,07	-

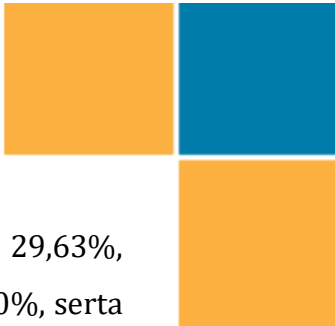
No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi Anggaran (%)
	BPPP Banyuwangi (indeks)					
10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	-	2.540.000	0	0	-
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Banyuwangi (%)	100	0	0	-	-
12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	120	3.011.859.000,00	571.259.198	18,97	101,033
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Banyuwangi (Nilai)	-	0	-	-	-
14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	-	4.210.000		0	0
15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	-	0		-	-
III. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
16	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	120	520.971.000	1.027.094	0,197	119,80
17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	110	1.706.520.000	517.077.038	30,30	79,70

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi Anggaran (%)
18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	120	14.412.000	0	0	120,00
19	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit)	113,33	108.247.000	7.500.000	6,93	106,40
20	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Banyuwangi (Paket)	-	35.442.000	0	0	-
21	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	-	96.297.993.000	23.413.360.319	24,31	-
JUMLAH		115,15	118.965.319.000	27.375.687.684	23,01	106,40

Secara keseluruhan, BPPP Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2026 mencatat capaian kinerja sebesar 115,15%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp27.375.687.684 dari total pagu Rp118.965.319.000 atau 23,01%, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 106,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target, sementara penyerapan anggaran masih relatif rendah pada awal tahun.

Pada sasaran terselenggaranya pelatihan kelautan dan perikanan, indikator masyarakat KP yang dilatih menunjukkan capaian kinerja 120%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.546.800 dari pagu Rp4.713.810.000 atau hanya 0,03%, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar 119,97%. Selain itu, indikator nilai PNBP juga mencapai 120%, namun realisasi anggaran masih 0% dari pagu Rp657.884.000, dengan efisiensi tercatat 120,00%. Kondisi ini menunjukkan capaian output yang tinggi meskipun penggunaan anggaran masih sangat minimal.

Pada sasaran tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, indikator



layanan dukungan manajemen internal menunjukkan capaian kinerja 29,63%, dengan realisasi anggaran Rp5.349.077 dari pagu Rp15.067.000 atau 35,50%, serta efisiensi sebesar 1,198%. Sementara itu, indikator Indeks Profesionalitas ASN memiliki realisasi anggaran Rp2.858.568.158 dari pagu Rp11.876.364.000 atau 24,07%, namun capaian kinerja belum dapat diukur pada triwulan ini. Indikator SIRUP menunjukkan capaian kinerja 120%, dengan realisasi Rp571.259.198 dari pagu Rp3.011.859.000 atau 18,97%.

Pada sasaran tata kelola pemerintahan, capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 masih bervariasi, dengan sebagian indikator menunjukkan progres awal dan sebagian lainnya belum terealisasi karena sifat kegiatan yang periodik. Indikator persentase layanan dukungan manajemen internal menunjukkan capaian kinerja sebesar 29,63%, dengan realisasi anggaran Rp5.349.077 dari pagu Rp15.067.000 atau 35,50%, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar -5,87%. Nilai efisiensi yang negatif ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja pada periode ini, yang umumnya disebabkan oleh pengeluaran rutin di awal tahun yang tidak langsung berbanding lurus dengan output kinerja. Indikator Indeks Profesionalitas ASN memiliki realisasi anggaran sebesar Rp2.858.568.158 dari pagu Rp11.876.364.000 atau 24,07%, namun capaian kinerja belum tersedia pada triwulan ini karena pengukurannya dilakukan secara periodik. Indikator Penilaian Mandiri SAKIP menunjukkan realisasi anggaran 0% dari pagu Rp2.540.000, sehingga belum terdapat capaian kinerja maupun efisiensi pada Triwulan I. Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan memiliki target capaian 100%, namun tidak memiliki alokasi anggaran dan belum terdapat realisasi maupun capaian kinerja pada periode ini. Indikator Persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP menunjukkan capaian kinerja sebesar 120%, dengan realisasi anggaran Rp571.259.198 dari pagu Rp3.011.859.000 atau 18,97%, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 101,03%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah. Sementara itu, indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran belum memiliki alokasi anggaran maupun realisasi pada triwulan ini. Adapun indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memiliki pagu Rp4.210.000, namun

realisasi masih 0%, sehingga capaian kinerja dan efisiensi belum dapat diukur.

Pada sasaran penyuluhan kelautan dan perikanan, capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang baik dengan tingkat efisiensi anggaran yang relatif tinggi, meskipun realisasi anggaran masih rendah karena sebagian kegiatan berada pada tahap awal pelaksanaan. Indikator kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang ditingkatkan kelasnya menunjukkan capaian kinerja sebesar 120%, dengan realisasi anggaran Rp1.027.094 dari pagu Rp520.971.000 atau 0,197%, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 119,80%. Hal ini menunjukkan capaian output yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang sangat minimal. Indikator kelompok yang disuluh mencatat capaian kinerja sebesar 110%, dengan realisasi anggaran Rp517.077.038 dari pagu Rp1.706.520.000 atau 30,30%, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar 79,70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah berjalan cukup signifikan dan penggunaan anggaran relatif sejalan dengan capaian kinerja. Indikator kelompok yang dibentuk menunjukkan capaian kinerja sebesar 120%, namun realisasi anggaran masih 0% dari pagu Rp14.412.000, sehingga efisiensi tercatat 120%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian output telah diperoleh tanpa penggunaan anggaran pada triwulan ini. Indikator pendampingan gabungan kelompok/koperasi desa merah putih mencatat capaian kinerja sebesar 113,33%, dengan realisasi anggaran Rp7.500.000 dari pagu Rp108.247.000 atau 6,93%, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 106,40%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian melampaui target dengan penggunaan anggaran yang masih rendah. Sementara itu, indikator media penyuluhan terstandar menunjukkan realisasi anggaran 0% dari pagu Rp35.442.000, sehingga belum terdapat capaian kinerja maupun efisiensi pada Triwulan I. Adapun indikator penyuluh perikanan yang lulus penilaian kompetensi memiliki realisasi anggaran sebesar Rp23.413.360.319 dari pagu Rp96.297.993.000 atau 24,31%, namun capaian kinerja belum tersedia, karena penilaian kompetensi dilakukan secara bertahap dan umumnya terealisasi pada periode berikutnya. Secara umum, sasaran penyuluhan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang cukup optimal, ditandai dengan beberapa indikator yang telah melampaui target seperti peningkatan kelas kelompok (120%) dan pembentukan kelompok (120%), dengan tingkat efisiensi yang tinggi (di atas 100%).

Namun demikian, realisasi anggaran masih relatif rendah (sebagian besar di bawah 30%), yang mencerminkan bahwa kegiatan masih berada pada tahap awal dan akan meningkat pada triwulan berikutnya.

Efisiensi anggaran Triwulan I Tahun 2026 tergolong sangat tinggi (106,40%), dengan capaian kinerja mencapai 115,15% dan realisasi anggaran baru 23,01%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai atau melampaui target dengan penggunaan anggaran yang masih rendah, yang umumnya disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang masih berada pada tahap awal tahun anggaran. Faktor pendukung utama meliputi peningkatan kompetensi SDM, sinergi antarunit kerja, digitalisasi layanan administrasi dan pelaporan, serta pemanfaatan teknologi dalam kegiatan penyuluhan. Di samping itu, komitmen pimpinan terhadap pengendalian internal, pengawasan rutin, dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Secara keseluruhan, kombinasi antara perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang hati-hati, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang mendorong capaian kinerja yang tinggi dan efisien.

Pencapaian efisiensi anggaran di BPPP Banyuwangi dilakukan melalui empat alur tahapan strategis yang terintegrasi untuk memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal dan akuntabel. Tahapan tersebut meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan Strategis dan Penetapan Prioritas BPPP Banyuwangi menerapkan dimensi efisiensi yang berorientasi pada kemanfaatan melalui inisiatif strategis berupa penetapan serta pengawalan indikator outcome. Selain itu, efisiensi dilakukan dengan menetapkan skala prioritas kegiatan

2. Pelaksanaan

Strategi Pelaksanaan Kegiatan Dalam aspek implementasi, BPPP Banyuwangi menerapkan pola koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan evaluasi melalui metode daring maupun campuran (*blended*). Seluruh pelaksanaan kegiatan diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja pimpinan yang berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta difokuskan pada penguatan kegiatan penyuluhan guna mendukung program prioritas Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi



Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Terintegrasi Pengawasan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara rutin guna menjamin ketepatan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemantauan telah bertransformasi melalui digitalisasi dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pendukung seperti E-Pegawai KKP, Kinerjaku KKP, Emonev Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu. Sistem ini mempercepat perolehan informasi kinerja bagi pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dioptimalkan sebagai instrumen insentif yang dibayarkan berdasarkan capaian kinerja, progres pekerjaan, dan tingkat kehadiran.

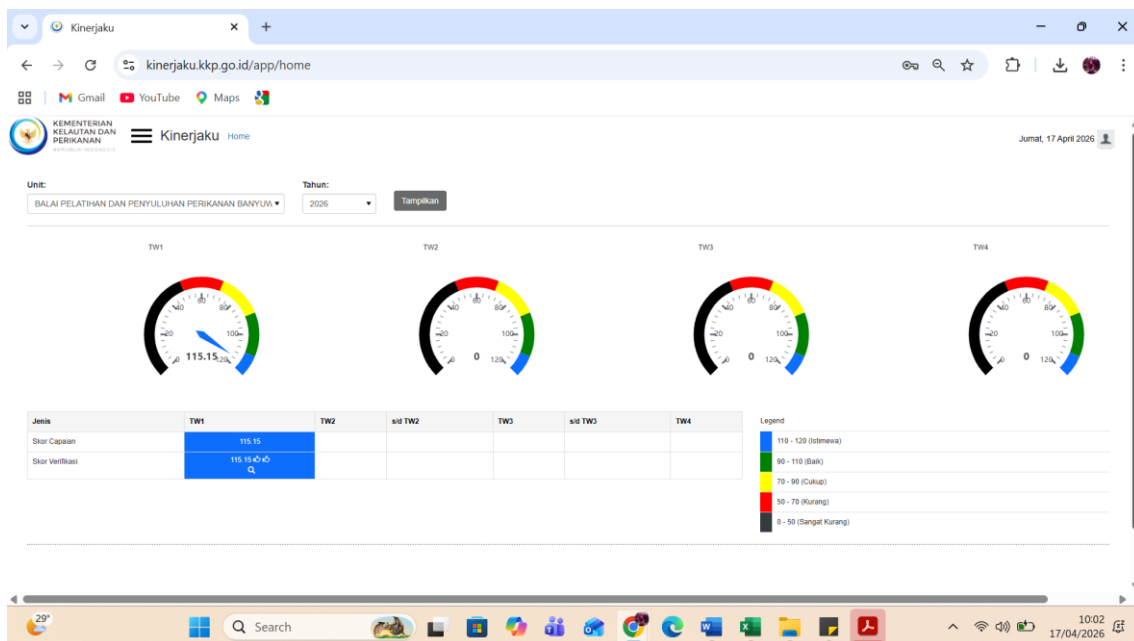
4. Penyesuaian

Penyesuaian dan Reviu Organisasi Sebagai tahap akhir, BPPP Banyuwangi bersikap adaptif terhadap dinamika organisasi dengan melakukan revisi indikator, target, maupun volume anggaran apabila hasil reviu menunjukkan perlunya perubahan atau pergeseran. Melalui proses identifikasi dan revisi yang sistematis, penyesuaian anggaran dilakukan secara terukur demi menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

BPPP Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2026 memiliki tanggung jawab 3 Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan 1 IK berstatus hijau, dan 9 IK berstatus biru. Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi pada triwulan ini **sebesar 115,15%**.



Gambar 5. Nilai Kinerja Organisasi Pada *Dashboard* Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja

tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026 sebesar 115,15%.

Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I (%)
III. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan					
1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	1.064	70	78	111,43
2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Banyuwangi yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75	-	-	-
3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	1.400	100	324	120
4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Banyuwangi (dokumen)	1	-	-	-
5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi (proposal)	1	-	-	-
6	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,09	0,03	0,22	120
7	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Banyuwangi (Dokumen)	1	-	-	-
IV. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	25	29,63	118,52
9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	-	-	-
10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	81	-	-	-
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Banyuwangi (%)	86	86	86	100
12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	77	77	100	120

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I (%)
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Banyuwangi (Nilai)	71	-	-	-
14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	-	-	-
15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,5	-	-	-
III. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
16	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	231	5	6	120
17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	6.911	1.000	1.100	110
18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	700	25	35	120
19	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit)	69	15	17	113,33
20	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Banyuwangi (Paket)	1	-	-	-
20	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	9	-	-	-

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BPPP Banyuwangi sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian adalah masih adanya target pada PK sementara anggaran yang ada untuk kegiatan tersebut sudah diblokir ataupun dilakukan efisiensi anggaran. Hal ini menjadi ganjalan pada pencapaian target pada tahun 2025. Selain itu, dalam pengumpulan data dukung masih ada ditemukannya data yang duplikat dan data yang kurang lengkap yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, maka hal yang harus dilakukan yaitu melakukan verifikasi data secara teratur dan teliti sehingga

capaian sesuai dengan data dukung yang ada.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPPP Banyuwangi dengan Puslat KP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Muchlisin
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lilly Aprilya Pregiwati
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Banyuwangi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Moch. Muchlisin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	1.064
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Banyuwangi yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	1.400
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Banyuwangi (dokumen)	1
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Banyuwangi (proposal)	1
		6	Nilai PNBSP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,09
		7	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Banyuwangi (Dokumen)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100
		9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	81
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Banyuwangi (%)	86
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	77
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Banyuwangi (Nilai)	71
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	2.942.800.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	15.210.402.000
Total Anggaran BPPP Banyuwangi		18.153.202.000

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Banyuwangi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Moch. Muchlisin

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Penyuluhan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Moch. Muchlisin**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Banyuwangi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Moch. Muchlisin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	231
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	6.911
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (Kelompok)	700
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Banyuwangi (Unit)	69
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Banyuwangi (Paket)	1
		6	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	9

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.575.040.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	96.297.993.000
Total Anggaran BPPP Banyuwangi		99.873.033.000

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Banyuwangi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Moch. Muchlisin